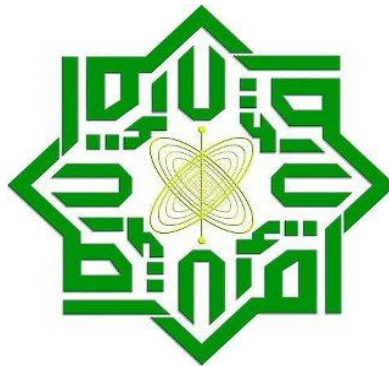


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN  
(Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert  
Kabupaten Bengkalis)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan  
S1 Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**DISUSUN OLEH :**

**HERI SETYO BUDI**  
**NIM. 10875003244**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2012**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)**

**Oleh :**

**HERI SETYO BUDI**

*Hutan Mangrove adalah vegetasi hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut dan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kelestarian ekosistem didaerah pesisir. Adapun yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah semakin banyaknya kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove di Kecamatan Rupert akibat dari pengalihfungsian dan penebangan komersial. Sehingga didapat perumusan masalah yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 30.555 orang yang terdiri dari Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis serta masyarakat Kecamatan Rupert. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini, untuk pegawai dinas penulis menggunakan teknik purposive random sampling dan untuk masyarakat menggunakan teknik slovin sampel, sehingga didapat sampel yang berjumlah 105 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya dengan mengadakan analisis terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan yang kemudian diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada responden dan hasil wawancara yang mendalam serta data-data yang sudah dalam bentuk dokumen. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert kurang terimplementasi dengan baik, tanggapan responden dari empat indikator implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berada dalam kategori kurang baik yaitu dengan jumlah rata-rata skor berjumlah 793 (756-1091). Adapun Kendala yang dihadapi pemerintah adalah kurangnya dukungan anggaran yang memadai, belum adanya Perda tentang mangrove, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.5. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1. Landasan Teori .....	18
2.1.1. Konsep Pemerintahan .....	18
2.1.2. Konsep Kebijakan .....	22
2.1.3. Konsep Implementasi Kebijakan .....	28
2.1.4. Konsep Pelestarian Hutan Mangrove .....	32
2.1.5. Konsep Perlindungan Hutan Menurut Al-Qur'an dan Hadits .....	36
2.2. Kerangka Berfikir .....	41
2.3. Hipotesis .....	43
2.4. Konsep Operasional .....	43
2.5. Operasional Variabel .....	44
2.6. Teknik Pengukuran .....	46
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	52

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	52
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	52
3.3.1. Data Primer .....	52
3.3.2. Data Sekunder .....	53
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.4.1. Interview (Wawancara) .....	53
3.4.2. Kuisisioner (Angket).....	54
3.4.3. Dokumentasi .....	54
3.5. Populasi dan Sampel .....	54
3.5.1. Populasi .....	54
3.5.2. Sampel .....	55
3.6. Teknik Analisa Data .....	58
 <b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	 59
4.1. Gambaran Singkat Kabupaten Bengkalis .....	59
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Rupert.....	55
4.2.1. Kondisi Geografis .....	55
4.2.2. Kondisi Demografi .....	57
4.2.2.1. Keadaan Penduduk .....	57
4.2.2.2. Agama .....	58
4.2.2.3. Pendidikan .....	59
4.2.2.4. Kesehatan .....	61
4.3. Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert .....	62
4.4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Rupert .....	62
 <b>BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	 74
5.1. Identitas Responden.....	74
5.1.1. Jenis Kelamin .....	74
5.1.2. Tingkat Pendidikan .....	74
5.1.3. Tingkat Umur .....	76

5.2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert.....	77
5.2.1. Komunikasi .....	79
5.2.2. Sumber Daya .....	88
5.2.3. Disposisi .....	96
5.2.4. Struktur Birokrasi .....	107
5.3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Responden Mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert.....	117
5.4. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert .....	118
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	121
6.1. Kesimpulan .....	121
6.2. Saran .....	124

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Penyebaran Hutan Mangrove di Kabupaten Bengkalis Dirinci Per Kecamatan .....	7
Tabel 1.2. Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Pada Tahun 2009.....	10
Tabel 1.3. Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Pada Tahun 2010.....	11
Tabel 1.4. Pengalihfungsian Lahan Mangrove di Kecamatan Rupert .....	12
Tabel 2.1. Analisis Kebijakan Menurut Dunn .....	25
Tabel 2.2. Operasional Variabel Penelitian .....	40
Tabel 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian .....	52
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Rupert Menurut Kelurahan/Desa ..	62
Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	63
Tabel 4.3. Distribusi Penduduk Kecamatan Rupert Menurut Agama .....	63
Tabel 4.4. Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Rupert .....	64
Tabel 4.5. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Rupert .....	65
Tabel 4.6. Jumlah Tenaga Pendidik di Kecamatan Rupert .....	65
Tabel 4.7. Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Rupert .....	66
Tabel 4.8. Jumlah Tenaga Medis di Kecamatan Rupert .....	66
Tabel 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	74
Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur .....	75
Tabel 5.3. Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	76
Tabel 5.4. Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	76

Tabel 5.5. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sosialisasi Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengenai Perlindungan Hutan Mangrove .....	80
Tabel 5.6. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Informasi Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tentang Pentingnya Melestarikan Hutan Mangrove .....	82
Tabel 5.7. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Informasi Tentang Sanksi Bagi Yang Merusak Hutan Mangrove .....	85
Tabel 5.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Rangka Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2009 .....	87
Tabel 5.9. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tersedianya SDM Yang Berkualitas Sebagai Pelaksana Kebijakan .....	90
Tabel 5.10. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tersedianya Fasilitas Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kebijakan .....	92
Tabel 5.11. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tersedianya Anggaran Yang Memadai Untuk Pelaksanaan Kebijakan .....	94
Tabel 5.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Yang Disediakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2009.....	96
Tabel 5.13. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Dan Pengetahuan Para Pelaksana Terhadap Kebijakan .....	98
Tabel 5.14. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Respon Dari Para Pelaksana Terhadap Implementasi Kebijakan .....	101
Tabel 5.15. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Insentif Kepada Para Pelaksana Kebijakan .....	104
Tabel 5.16. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Disposisi Para Pelaksana Terhadap Implementasi 60 Tahun 2009 .....	106
Tabel 5.17. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan .....	108
Tabel 5.18. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Sanksi Terhadap Penyimpangan Yang Terjadi .....	111

Tabel 5.19. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tanggungjawab Dalam Bekerja .....	113
Tabel 5.20. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Struktur Birokrasi Dalam Rangka Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2009 .....	115
Tabel 5.21. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis .....	117



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Semenjak dicanangkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan desa. Inilah konsekuensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma baru yang harus dipilih. Undang-undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan kewenangan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan kabupaten / kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah bersangkutan, kewenangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam

penjelasan Pasal 14 ayat (2) tersebut antara lain adalah kewenangan untuk mengurus urusan dibidang kehutanan.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada kita merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan sebagai salah satu kekayaan alam yang menjadi modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat baik itu manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu hutan harus dikelola dan dipelihara secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat terbatas pada pola umum dan penyusunan rencana makro rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan

dan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di kawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pengelolaan sumber daya alam terdapat dua paradigma yaitu, pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang berpusat pada Negara (*state based forest management*) dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat (*community based forest management*). Paradigm pertama menempatkan pemerintah dalam posisi sentral dan menentukan, sedangkan masyarakat mendapat peran hanya sebagai pelengkap. Sebaliknya paradigma kedua menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan administrator untuk mendukung proses tersebut.

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam Indonesia yang tiada ternilai harganya, termasuk didalamnya kawasan hutan mangrove dengan ekosistem yang khas dan unik. Kekayaan alam yang satu ini mempunyai potensi yang besar bagi kepentingan manusia. Sehingga perlu diperhatikan dan dilestarikan keberadaannya (Purno Basuki, 2005 : 1).

Hutan dan ekosistem mangrove secara umum menempati habitat pasang surut dipantai-pantai terlindung di daerah tropis dan sub tropis. Habitat yang ditumbuhi mangrove kebanyakan mempunyai kondisi lingkungan khusus seperti pantai-pantai pada teluk yang terlindung, estuary, delta, bagian terlindung dari tanjung, selat yang terlindungi dan tempat-tempat serupa dengan kondisi tanahnya bervariasi antara lumpur, lempung, gambut dan pasir (Purno Basuki, 2005 : 1).

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung atau pantai-pantai yang datar, biasanya di sepanjang sisi pulau yang terlindung dari angin atau di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung (Nybakken, 1992).

Ekosistem hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis, namun labil. Dikatakan kompleks karena ekosistemnya di samping dipenuhi oleh vegetasi mangrove, juga merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Jenis tanah yang berada di bawahnya termasuk tanah perkembangan muda (saline young soil) yang mempunyai kandungan liat yang tinggi dengan nilai kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation yang tinggi.

Sebagai daerah peralihan antara laut dan darat, ekosistem mangrove mempunyai gradien sifat lingkungan yang tajam. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya fluktuasi beberapa faktor lingkungan yang besar, terutama suhu dan salinitas. Oleh karena itu, jenis-jenis tumbuhan dan binatang yang memiliki toleransi yang besar terhadap perubahan ekstrim faktor-faktor tersebutlah yang dapat bertahan dan berkembang. Kenyataan ini menyebabkan keanekaragaman jenis biota mangrove kecil, akan tetapi kepadatan populasi masing-masing umumnya besar. Karena berada di perbatasan antara darat dan laut, maka hutan mangrove merupakan ekosistem yang rumit dan mempunyai kaitan, baik dengan ekosistem darat maupun lepas pantai. Mangrove di Indonesia mempunyai keragaman jenis yang tinggi yaitu memiliki 89 jenis tumbuhan yang

terdiri dari 35 jenis pohon, 5 jenis terna, 9 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit, dan 2 jenis parasit.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya --terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah-- tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Undang-undang RI no 41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan :

*“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.*

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.

Kawasan hutan lindung menurut Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan hal tersebut maka kawasan hutan mangrove ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Selanjutnya menurut pasal 26 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk

ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Sehubungan dengan banyaknya terjadi kerusakan hutan tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yang kemudian terjadi perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, gangguan ternak, kebakaran, daya-daya alam serta oleh hama dan penyakit.

Hutan mangrove di daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bagian dari formasi vegetasi indo-malaya yang mencakup pantai di daerah Indonesia dan Malaysia khususnya Riau. Luas hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis seluas 41.718 Ha yang tersebar disepanjang pantai disemua pulau yang ada (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis 2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dipertegas dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 mengamanatkan bahwa Dinas Kehutanan mendapatkan kewenangan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di perairan

dalam hal ini dalam kawasan Hutan Mangrove yang tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk dalam hal ini, Hutan Mangrove di kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang telah dinyatakan sebagai kawasan hutan yang wajib dilindungi dikarenakan hutan mangrove di Kecamatan Rupert dikategorikan sebagai lahan yang mendekati hutan kritis dan hutan yang dilindungi.

Untuk melihat penyebaran hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis Penulis sajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 : Luas Penyebaran Hutan Mangrove Di Kabupaten Bengkalis Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Rupert Utara	12.784	30,64
2	Rupert	5.806	13,91
3	Bantan	5.584	13,38
4	Bengkalis	4.258	10,20
5	Mandau	6.721	16,11
6	Pinggir	2.215	5,30
7	Siak Kecil	3.452	8,27
8	Bukit Batu	898	2,15
<b>Jumlah</b>		<b>41.718</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Analisis Citra Satelit 2009 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Perkebunan Kabupaten Bengkalis*

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga ikut mengalami perubahan yang pesat. Hal ini disebabkan kepadatan penduduk telah mendekati bahkan melampaui tingkat keseimbangan rasio yang normal antara luas dampak peningkatan penduduk terhadap kelestarian hutan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk khususnya di daerah pinggiran pantai maka kebutuhan masyarakat akan kayu bakar, kayu pertukangan, dan sebagainya.

Era pembangunan yang semakin pesat dengan mengembangkan ekonomi nasional, menempatkan wilayah pesisir dan pantai pada posisi yang penting. Pusat-pusat industri, pusat pembangkit listrik, lokasi rekreasi, pemukiman, pertambakan dan sarana perhubungan lainnya yang banyak dibangun di wilayah pesisir merupakan dilema. Disatu pihak dapat meningkatkan pendapatan rakyat, tetapi dilain pihak dapat menimbulkan dampak negative bila pelaksanaannya tidak dilakukan secara terkoordinasi dan hanya mengutamakan kepentingan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Kecenderungan semakin meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan mangrove telah menyebabkan terganggunya ekosistem hutan mangrove sehingga tidak mampu berperan sesuai dengan fungsinya. Penyebab utama berkurangnya hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Rupat adalah karena adanya penebangan komersial dan pengalihfungsian kawasan hutan mangrove. Adanya perubahan tataguna dan fungsi lahan mangrove serta berbagai aktifitas pembukaan lahan telah menyebabkan semakin berkurangnya luas hutan mangrove dan terjadinya perubahan komposisi vegetasi pada berbagai strata pertumbuhan.

Perubahan fungsi hutan mangrove membawa dampak implikasi terhadap orientasi pengelola dan kontribusi partisipasi kepada masyarakat sekitar hutan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap ancaman kelestarian hutan mangrove seperti yang terjadi di pesisir pantai Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam serta hama dan penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selanjutnya pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan bahwa, untuk mencegah dan mempertahankan serta menjaga kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan dibidang kehutanan.
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan
- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
- f. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin.
- g. Meningkatkan efektifitas koordinasi perlindungan hutan.
- h. Mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat.
- i. Meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.

- j. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan atau;
- k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Permasalahan yang terjadi adalah dimana tidak ada kesesuaian antara kebijakan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Hutan harus dijaga dari segala bentuk kerusakan tetapi dalam kenyataan dilapangan banyak terjadi kerusakan-kerusakan baik yang disebabkan oleh manusia maupun hal lainnya. Kerusakan-kerusakan tersebut semakin hari semakin besar sehingga mengakibatkan pengurangan dari ekosistem hutan khususnya hutan mangrove.

Untuk melihat kondisi lahan mangrove yang ada saat ini di Kecamatan Rupat, penulis sajikan luas lahan hutan mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 yaitu pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 : Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2009**

No	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Batu Panjang	1034	17,81
2	Tanjung Kapal	761	13,11
3	Terkul	1565	26,95
4	Pergam	1035	17,82
5	Sukarjo Mesim	29	0,50
6	Darul aman	362	6,23
7	Makeruh	284	4,89
8	Sungai Cingam	591	10,18
9	Teluk Lecah	145	2,50
10	Hutan Panjang	-	-
11	Parit Kebumen	-	-
12	Pangkalan Nyirih	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5.806 Ha</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis 2011*

Setelah melihat luas lahan mangrove tersebut kemudian penulis menyajikan luas lahan hutan mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.3 : Luas Wilayah Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2010**

No	Kelurahan / Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Batu Panjang	982	18,45
2	Tanjung Kapal	663	12,45
3	Terkul	1485	27,90
4	Pergam	993	18,65
5	Sukarjo Mesim	12	0,23
6	Darul aman	304	5,71
7	Makeruh	230	4,32
8	Sungai Cingam	543	10,20
9	Teluk Lecah	131	2,46
10	Hutan Panjang	-	-
11	Parit Kebumen	-	-
12	Pangkalan Nyirih	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5.323 Ha</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis 2011*

Dari tabel diatas dapat dilihat Hutan Mangrove di kecamatan Rupat semakin hari semakin berkurang ekosistemnya. Perbandingan jumlah hutan Mangrove di Rupat pada tahun 2009 adalah 5.806 Hektar, sedangkan pada tahun 2010 Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat hanya berjumlah 5.323 Hektar saja. Hal ini berarti hutan mangrove mengalami pengurangan sebesar 483 Hektar. Semakin hari kondisi hutan mangrove semakin berkurang, dari 9 sembilan desa yang ada di Kecamatan Rupat hanya beberapa desa saja yang masih memiliki lahan hutan mangrove yang luas yaitu Desa Terkul, Desa Pergam, Desa Batu Panjang, dan Desa Tanjung Kapal sedangkan desa-desa yang lainnya sudah mengalami pengurangan lahan mangrove yang cukup signifikan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengalihfungsian hutan mangrove di Kecamatan Rupat yang terjadi di beberapa desa/kelurahan yang ekosistem

hutan mangrove pada daerah tersebut mengalami pengurangan yang sangat signifikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4 : Pengalihfungsian Lahan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis**

No	Desa	Jenis Pengalihan	Luas (Ha)
1	2	3	4
1	Batu Panjang	- Pemukiman Penduduk - Pembangunan ruko - Pembangunan Turap - Jalan dan Jembatan	23 Ha 2 Ha 5 Ha 15 Ha
2	Tanjung Kapal	- Jalan dan Jembatan - Lahan perkebunan - Bekas tambak udang - Pemukiman suku asli - Industri pembuatan tali tambang	40 Ha 25 Ha 2 Ha 17 Ha 15 Ha
3	Pergam	- Bekas pasar tradisional - Pemukiman Penduduk - Tanggul - Pembangunan ruko - Jalan dan jembatan	3 Ha 30 Ha 3 Ha 4 Ha 8 Ha
4	Terkul	- Areal perkebunan - Bekas tambak udang - Pasar Tradisional - Pemukiman Penduduk - Pembuatan tanggul dan bodi jalan - Jalan dan jembatan	19 Ha 6 Ha 2 Ha 25 Ha 12 Ha 7 Ha
<b>Jumlah</b>			281 Ha

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis 2011*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa begitu luasnya areal lahan mangrove yang telah mengalami pengalihfungsian baik itu untuk pembuatan jalan, perkebunan, perikanan maupun untuk lahan pemukiman. Luas Hutan mangrove yang terdata oleh dinas kehutanan Kabupaten Bengkalis yang mengalami pengalihfungsian adalah 281 hektar.

Dari tabel hutan mangrove di Kecamatan Rupert yang terdata oleh dinas kehutanan Kabupaten Bengkalis hutan mangrove pada tahun 2009 yang berjumlah 5.806 Hektar. Jika dikurangi dengan data terbaru pada tahun 2010 yaitu 5.323 Hektar, maka luas hutan mangrove mengalami pengurangan sebesar 483 Hektar. Hal ini berarti luas hutan mangrove jika dikurangi dengan pengalihfungsian hutan mangrove yang terdata oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan yaitu 483 Hektar dikurangi 281 Hektar adalah 202 Hektar. Berdasarkan data tersebut jumlah hutan mangrove yang mengalami kerusakan yang tidak terdata oleh Dinas Kehutanan adalah 202 Hektar.

Dilihat dari beberapa pengalihfungsian hutan mangrove dapat dilihat bahwa kerusakan hutan ada yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah, seperti pembuatan jalan dan jembatan, pasar tradisional dan sebagainya. Berdasarkan perubahan fungsi lahan mangrove tersebut, mengakibatkan berkurangnya lahan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert. Selain itu, adanya penebangan-penebangan komersial dan penebangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat serta kerusakan yang disebabkan oleh alam juga mengurangi ekosistem dari hutan mangrove di kecamatan Rupert.

Dari berbagai bentuk permasalahan diatas, penulis melakukan dengan masyarakat di Kecamatan Rupert yaitu Bapak Hendra, beliau mengatakan bahwa :

*“Hutan mangrove di Kecamatan Rupert mengalami kerusakan yang sangat parah, hal ini dapat dilihat dari jumlah hutan mangrove yang semakin berkurang. Selain itu dapat dilihat banyak terjadi penebangan liar dan pengalihfungsian hutan mangrove menjadi tempat pemukiman dan areal perkebunan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu perlu perhatian pemerintah dalam menangani hal tersebut, karena peraturan yang ada belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat”. (hasil wawancara dengan Bapak Hendra pada hari selasa tanggal 29 november 2011)*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui sepenuhnya masalah tentang perlindungan hutan mangrove dari segala kerusakan. Hal itu ditandai dengan masih banyak terjadi kerusakan pada hutan mangrove di Kecamatan Rupat baik disebabkan oleh penebangan liar maupun pengalihfungsian hutan mangrove. Selain itu masyarakat menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berjalan dengan baik sehingga upaya perlindungan hutan mangrove belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Dari permasalahan diatas, dapat dilihat walaupun banyak kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan tetapi belum efektif dilaksanakan seperti yang terlihat dengan semakin berkurangnya lahan mangrove yang ada di Kabupaten Bengkalis, yang salah satunya diakibatkan oleh penebangan liar dari masyarakat setempat serta pengalihfungsian lahan. Jika dilihat dari setiap Kecamatan maka hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupat yang mengalami kerusakan yang paling signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya pengalihfungsian lahan. Dari berbagai bentuk permasalahan diatas pemerintah harus mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan dengan baik demi terjaganya ekosistem hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Dengan melihat kondisi hutan mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diterangkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)”*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pemanfaatan hutan mangrove untuk memenuhi kebutuhan manusia telah menyebabkan menurunnya kualitas dan fungsi hutan mangrove. Ekosistem mangrove dikatakan lestari jika fungsi ekologi dan ekonominya dapat berjalan dengan baik. Fungsi ekologi meliputi kemampuan daya dukung ekosistem mangrove terhadap lingkungan sekitarnya, dan dikatakan baik jika tutupan areal tinggi, siklus energy berjalan baik dan keseimbangan lingkungan terjaga. Kemudian untuk fungsi sosial ekonomi, dikatakan baik jika ekosistem mangrove masih dapat dimanfaatkan secara lestari oleh masyarakat sekitar, pemanfaatan mangrove perlu dapat perhatian khusus karena jika diekploitasi berlebihan akan mengakibatkan kerusakan.

Untuk hutan mangrove yang ada dikawasan pantai Kecamatan Rupert saat sekarang ini sudah mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan hal ini disebabkan oleh pemanfaatan untuk tujuan komersial serta pengalihfungsian lahan mangrove.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertolak pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dan masyarakat luas kondisi hutan mangrove yang ada di daerah Kabupaten Bengkalis pada umumnya dan Kecamatan Rupat khususnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hutan mangrove.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai masalah yang sama

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.



## **BAB II : Telaah Pustaka**

Pada bab ini akan mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan skripsi diantaranya berupa konsep pemerinrahan, konsep kebijakan dan implementasi kebijakan, Konsep pelestarian hutan mangrove, defenisi konsep, defenisi operasional, hipotesis dan kerangka berfikir.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

## **BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang Lokasi Penelitian yang terdiri dari Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Rupert, Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Rupert

## **BAB V : Pembahasan dan Hasil**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari Identitas Responden, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam implementasi PP Nomor 60 Tahun 2009

## **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Konsep Pemerintahan**

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan yang di teliti. Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka di perlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan negara. Dalam ilmu negara, ilmu politik di kenal dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara biasanya di sebut dengan istilah pemerintahan.

Menurut Syafi'ie (2002 : 11) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dianjurkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas). Sedangkan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem yang menjalankan perintah, sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, pembuatan pemerintah.

Menurut H . A. Brasz dalam Syafi'ie *De bestuurswetenschap waaronder hert verstaat de wetenschaps die zieh bezighoudt met de wijze waarop de*

*openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers*, yang maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya (dalam Syafi'ie, 2002 : 12).

Rasyid (2002 : 14-16) mengatakan bahwa Tugas-tugas pokok pemerintahan, tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Ndraha (2008 : 67) mengatakan bahwa Pemerintah bertujuan melindungi hak-hak esensial (azazi) manusia, melestarikan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran yaitu:

1. Membentuk, meningkatkan dan melestarikan semua nilai sumber daya pendukung kehidupan yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru (peran Sub Kultur Ekonomi)
2. Mengontrol Sub Kultur Ekonomi, memberdayakan Sub Kultur Ekonomi dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh Sub Kultur Ekonomi, melalui pelayanan kepada SKP, memberdayakan SKP agar SKP mampu membuat pilihan dan berkesempatan.
3. Mengontrol Sub Kultur Kekuasaan dihulu dan dihilir.

Selanjutnya Ndraha (2003 : 6) mengatakan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Menurut Labolo (2007 : 24) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau di inginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dan sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Pada umumnya yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan memerintah.

Selanjutnya Ndraha (2003 : 76) menyebutkan berbagai konsep (defenisi) pemerintah:

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute proveding (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau frivatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh di konstitusi negara yang bersangkutan di sebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif

4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eskutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemeliharaan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya di hadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalani konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pernerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah di anggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukurn yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-undang.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (Binnenalans bestuur, BB pamong praja).

11. Pemerintah dalam konsep pemerintahan yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empirik memperoses jasa publik dan layanan sipil.

Sedangkan menurut Ndraha (2003 :5 ) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan akan jasa publik dan layanan sipil.

### **2.1.2. Konsep Kebijakan**

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 : 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan

berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap

kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan public adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 : 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia



5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Kelima tahap pembuatan kebijakan diatas dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 : Analisis Kebijakan Menurut Dunn**

<b>Analisis Kebijakan</b>	<b>Pembuatan Kebijakan</b>
a. Perumusan Masalah	a. Penyusunan agenda
b. Peramalan	b. Formulasi kebijakan
c. Rekomendasi	c. Adopsi kebijakan
d. Pemantauan	d. Implementasi kebijakan
e. Penilaian (evaluasi)	e. Penilaian kebijakan

*Sumber : Dunn dalam Nugroho 2007*

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain :
  - a. Pencarian masalah
  - b. Pendefinisian masalah
  - c. Spesifikasi masalah
  - d. Pengenalan masalah
2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi actual tentang situasi social dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan yaitu :
  - a. Akurasi ramalan.
  - b. Kondisi komperatif masa depan.
  - c. Konteks, yaitu konteks institusional, temporal dan historical.
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain:
  - a. Efektifitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan

- e. Responsifitas
- f. Kelayakan
- 4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi yaitu :
  - a. Ekplanasi
  - b. Akutansi
  - c. Pemeriksaan
  - d. Kepatuhan
- 5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ apa perbedaan yang dibuat ?” kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan yaitu :
  - a. Efektifitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsifitas
  - f. Kelayakan

Winter (dalam Nugroho, 2007 : 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2002 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu

maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2001 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

### **2.1.3. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi. Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Mazmanian (dalam Wahab, 2002 : 440) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu :

1. Variabel independent yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2. Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan

atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Menurut George C. Edward ( Edward III ) dalam Agustino (2006:157-158) ada empat empat faktor atau indikator yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu :

1. Komunikasi,

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga faktor tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari

para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Budi Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

### 4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Adapun hubungan antara teori implementasi kebijakan dengan penelitian, ini dilihat dari teori Edward III dalam Reza Herdasari (2010 : 29) adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik,
2. Sumber Daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung dan kecakapan pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan,
3. Disposisi, berbicara tentang ketersediaan implementor kebijakan dalam implementasi kebijakan,
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

#### **2.1.4. Konsep Pelestarian Hutan Mangrove**

Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantainya selalu tergenang air. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Kata mangrove adalah kombinasi antara bahasa Portugis *mangue* dan bahasa Inggris *grove*. Adapun dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan untuk menunjuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang-surut maupun untuk individu-individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Sedangkan dalam bahasa Portugis kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, sedangkan kata mangal untuk menyatakan komunitas tumbuhan tersebut. Nybakken mengatakan bahwa hutan mangrove adalah sebutan umum yang



digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropic yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Mangrove tumbuh disepanjang garis pantai tropis sampai sub tropis.

Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan rapat serta memiliki jenis pohon yang selalu berdaun. Keadaan lingkungan di mana hutan mangrove tumbuh, mempunyai faktor-faktor yang ekstrim seperti salinitas air tanah dan tanahnya tergenang air terus menerus. Meskipun mangrove toleran terhadap tanah bergaram (halophytes), namun mangrove lebih bersifat facultative daripada bersifat obligative karena dapat tumbuh dengan baik di air tawar. Flora mangrove terdiri atas pohon, epipit, liana, alga, bakteri dan fungi. Jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan di hutan mangrove Indonesia adalah sekitar 89 jenis, yang terdiri atas 35 jenis pohon, 5 jenis terpa, 9 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit dan 2 jenis parasit.

Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove yang banyak ditemukan antara lain adalah jenis api-api (*Avicennia* sp), bakau (*Rhizophora* sp), tancang (*Bruguiera* sp), dan bogem atau pedada (*Sonneratia* sp), merupakan tumbuhan mangrove utama yang banyak dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang menangkap, menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya. Fauna mangrove hampir mewakili semua phylum, meliputi protozoa sederhana sampai burung, reptilia dan mamalia. Secara garis besar fauna mangrove dapat dibedakan atas fauna darat (terrestrial), fauna air tawar dan fauna laut. Fauna darat, misalnya kera ekor

panjang (*Macaca spp.*), Biawak (*Varanus salvator*), berbagai jenis burung, dan lain-lain. Sedangkan fauna laut didominasi oleh Mollusca dan Crustaceae. Golongan Mollusca umumnya didominasi oleh Gastropoda, sedangkan golongan Crustaceae didominasi oleh Bracyura.

Hutan mangrove memiliki berbagai macam fungsi. Menurut Rahmawaty (2006), beberapa fungsi yang dimiliki hutan mangrove adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Fisik

Menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi (abrasi) dan intrusi air laut, peredam gelombang dan badai, penahan lumpur, penangkap sedimen, pengendali banjir, mengolah bahan limbah, penghasil detritus, memelihara kualitas air, penyerap CO<sub>2</sub> dan penghasil O<sub>2</sub> serta mengurangi resiko terhadap bahaya tsunami.

Irawan (2005) melaporkan bahwa keberadaan hutan mangrove dapat memperkecil resiko akibat dampak tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam. Daerah-daerah yang memiliki *front* zonasi mangrove kerusakannya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki *front* hutan mangrove. Adanya perubahan lingkungan ekosistem wilayah pesisir laut secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem komunitas yang berada di dalamnya, termasuk terhadap keanekaragaman jenis dan struktur komunitas yang berada dalam ekosistem tersebut.

b. Fungsi Biologis

Merupakan daerah asuhan (*nursery ground*), daerah untuk mencari makan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning ground*) dari berbagai biota

laut, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota, sumber plasma nutfah (hewan, tumbuhan dan mikroorganisme) dan pengontrol penyakit malaria.

### c. Fungsi Sosial Ekonomi

Pada dasarnya hutan mangrove merupakan ekosistem yang kaya dan menjadi salah satu sumberdaya yang produktif. Namun sering pula dianggap sebagai lahan yang terlantar dan tidak memiliki nilai sehingga pemanfaatan yang mengatasnamakan pembangunan menyebabkan terjadinya kerusakan. Pengelolaan tambak memang menjanjikan hasil yang menggiurkan tetapi sangat perlu dilihat kesinambungan dan kelestarian lingkungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kondisi ini memerlukan suatu strategi yang jelas dan nyata untuk dapat mempertahankan dan mengelola secara baik dan utuh hutan mangrove. Untuk itu perlu dikaji pendayagunaan potensi hutan mangrove, sebagai salah satu bagian dari ekosistem pesisir, secara berkelanjutan berbasis masyarakat.

Upaya menjaga kelestarian hutan mangrove dapat dilakukan melalui teknik *silvofishery* dan pendekatan *bottom up* dalam upaya rehabilitasi. *Silvofishery* merupakan teknik pertambakan ikan dan udang yang dikombinasikan dengan tanaman kehutanan dalam hal ini adalah vegetasi hutan mangrove. Usaha ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memelihara ekosistem hutan mangrove sehingga terjaga kelangsungan hidupnya. Pengelolaan hutan mangrove sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan dalam kaitan kondisi mangrove yang rusak, kepada setiap

orang yang memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat terbatas pada pola umum dan penyusunan rencana makro rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di kawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah harus mempertahankan kondisi mangrove yang masih ada dengan menghentikan perizinan yang bertujuan mengkonversikan hutan mangrove menjadi bentuk lain seperti tambak, pertanian, HPH, industri, pemukiman dan sebagainya.

#### **2.1.5. Konsep Perlindungan dan Pelestarian Hutan Menurut Al-Quran dan Hadits**

Hutan Mangrove merupakan merupakan vegetasi hutan yang tumbuh dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantainya selalu tergenang air. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Hutan mangrove memiliki banyak berfungsi bagi keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan, rantai makanan, melindungi abrasi laut dan keberlanjutan sumber daya lautan demi kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka dari itu hutan mangrove harus dilindungi dari segala bentuk kerusakan baik yang disebabkan oleh manusia maupun hal lainnya.

Penjelasan Al-Qur'an mengenai perlindungan hutan dari segala bentuk kerusakan sangat jelas dan prospektif. Dijelaskan dalam Al-Qur'an hutan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara hutan dan isinya, larangan merusak hutan dan isinya, peringatan mengenai kerusakan hutan dan isinya yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah SWT serta solusi perlindungan hutan dan isinya. Kemudian Hadits menjelaskan bagaimana perlindungan hutan secara rinci dan detail. Al-Qur'an meletakkan dasar dan prinsipnya secara global, sedangkan As-Sunnah berfungsi menerangkan dan menjelaskannya dalam bentuk hukum-hukum, pengarahan pada hal-hal tertentu dan berbagai penjelasan yang lebih rinci.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah yang bertugas memimpin bumi. Namun demikian, pada pelaksanaannya manusia sering kali menyalahgunakan kepercayaan Allah dengan melakukan aktivitas-aktivitas dan atau menghasilkan sesuatu yang berdampak negatif terhadap alam. Manusia seharusnya menjadi pemimpin yang egaliter. Cara pandang yang harus dikonstruksi adalah bahwa manusia adalah bagian dari sistem alam yang menempati posisinya sebagai pemimpin dalam sistem alam tersebut. Apabila salah satu komponen alam tersebut berjalan tidak semestinya, maka akan terjadi kerusakan pada sistem secara keseluruhan. Maka dari itu, pandangan egaliter tentang hidup dan alam harus dibangun dalam diri setiap pribadi manusia.

Allah SWT berfirman Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Qashash Ayat 77 yaitu :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. 28:77).

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-

Baqarah ayat 205 :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : "Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan" (QS. 2: 205).

Dari ayat diatas sangat jelas maksudnya, yakni melarang manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya melakukan perusakan alam di muka bumi sebab Allah SWT melaknat orang-orang yang hidupnya menimbulkan kerusakan di bumi. Dan dari penjelasan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi dilarang untuk merusak hutan dan isinya baik itu hutan mangrove dan lainnya. Maka dari itu, sebagai umat islam sudah seharusnya kita menjaga dan melindungi hutan beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Menurut kajian Ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah

hukumnya haram, itu menunjukkan bahwa perintah melestarikan alam hukumnya wajib.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya agar manusia sebagai khalifah di bumi bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Hal itu dimaksudkan agar keseimbangan alam dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari bencana. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa manusia harus melindungi alam yang didalamnya berupa hutan mangrove agar terjaga dari berbagai bentuk kerusakan. Tetapi pada kenyataannya kerusakan alam dan lingkungan ini merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.

Dalam hal perlindungan hutan dari segala bentuk kerusakan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya.

*"Barangsiapa yang memotong pohon Sidrah maka Allah akan meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka." (HR. Abu Daud dalam Sunannya)*  
*"Barangsiapa di antara orang Islam yang menanam tanaman maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekahnya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barangsiapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari Kiamat." (HR.Muslim).*

Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41 yaitu :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
 يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan

*sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)". (QS. Ar-Rum: 41).*

Manusia sering melakukan hal-hal yang berujung pada rusaknya alam, seperti penggundulan hutan mangrove secara besar-besaran, konsumsi energi yang berlebihan, konversi lahan, penambangan yang melampaui batas, dan masih banyak lainnya. Seharusnya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang terjadi di muka bumi ini. Hal ini merupakan suatu ironi dimana perusakan yang dahsyat terhadap alam justru dilakukan oleh makhluk yang seharusnya bertindak sebagai khalifah yaitu pelindung dan pemelihara bumi ini.

Penebangan hutan mangrove tanpa diikuti peremajaan kembali menyebabkan rusaknya ekosistem hutan mangrove tersebut. Apalagi adanya pemanfaatan secara besar-besaran hutan mangrove tersebut semakin menyebabkan rusaknya ekologi hutan mangrove tersebut. Padahal keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan hidrologik dan klimatologik, termasuk sebagai tempat berlindungnya binatang yang hidup didalamnya.

Melihat kenyataan tersebut, mestinya perkara konservasi hutan dan lahan sudah merupakan suatu keharusan, demi berlangsungnya kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan antara lain reboisasi atau penanaman kembali dan lainnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda yaitu sebagai berikut :

*"Tanamlah bibit pohon yang ada ditanganmu sekarang juga, meski besok kiamat. Allah akan tetap memperhitungkan pahalanya."*

Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban seorang muslim dalam melakukan pelestarian alam yaitu sebagai berikut :



*“Hadits dari Anas r.a. dia berkata: Rasulullah S.a.w. bersabda : Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya,*

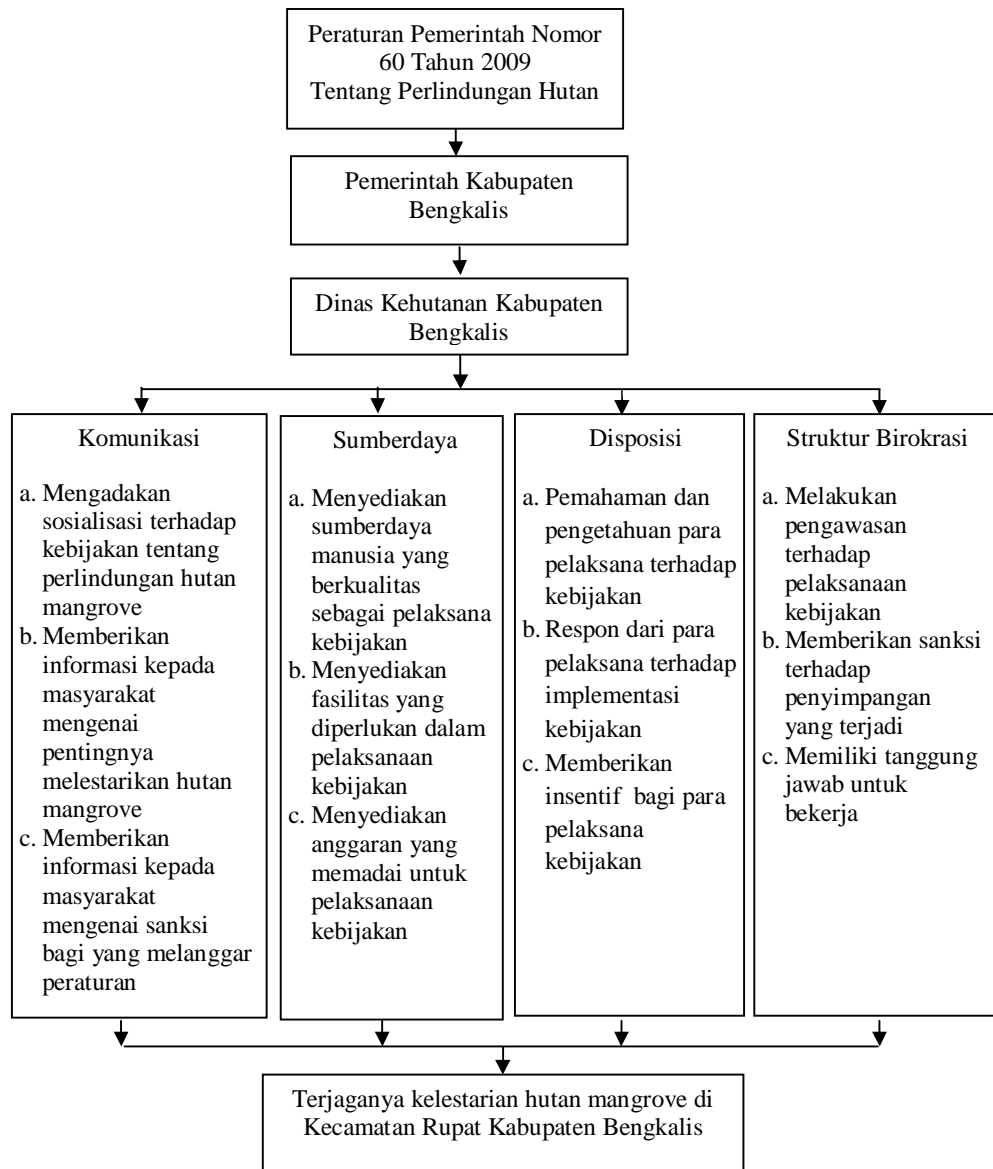
Berdasarkan hadist di atas sangat jelas bahwa Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan kelestarian alam yang didalamnya termasuk perlindungan hutan mangrove. Rasulullah SAW juga banyak memberikan keteladanan untuk umatnya. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan tetap ada pertanggungjawabannya di alam akhirat nanti. Penghijauan merupakan amalan sholeh yang mengandung banyak manfaat bagi manusia di dunia dan untuk membantu kemaslahatan akhirat manusia. Tanaman dan pohon yang ditanam oleh seorang muslim memiliki banyak manfaat, seperti pohon itu bisa menjadi naungan bagi manusia dan hewan yang lewat, buah dan daunnya terkadang bisa dimakan, akarnya bisa mencegah terjadinya erosi dan banjir, daunnya bisa menyejukkan pandangan bagi orang melihatnya, dan pohon juga bisa menjadi pelindung dari gangguan tiupan angin, membantu sanitasi lingkungan dalam mengurangi polusi udara, dan masih banyak lainnya.

## **2.2. Kerangka Berfikir**

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut:

**Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikiran Penelitian Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove Di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)**



*Sumber : Modifikasi Penulis 2011*

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melaksanakan pengecekannya ( Sudjana, 1996 : 210 ).

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, perumusan masalah, dalam kerangka teori maka dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu : *“Diduga Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis kurang terimplementasi dengan baik.*

### 2.4. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dalam menafsirkan istilah dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan-batasan konsep diantaranya :

- a. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan.
- b. Implementasi atau pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan diterapkan atau dilaksanakan secara nyata dan sistematis.
- c. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009

Tentang Perlindungan Hutan, khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert.

- d. Sumberdaya yaitu menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan untuk memudahkan administrasi, sumberdaya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, dana dan insentif.
- e. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.
- f. Struktur birokrasi yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas hirarki terhadap keputusan.
- g. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- h. Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh didaerah pantai dan sekitar muara sungai (selain dari formasi hutan pantai) yang selalu atau secara teratur digenangi oleh air laut serta di pengaruhi pasang surut.

## **2.5. Operasional Variabel**

Adapun operasional variabel pada penelitian akan penulis sajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.2 : Operasional Variabel Penelitian**

Konsep	Variabel	Indikator	Subindikator
1	2	3	4
Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan	1. Komunikasi	a. Mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan tentang perlindungan hutan mangrove b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut
		2. Sumber Daya	a. Menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan c. Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan
		3. Disposisi	a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan b. Respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan c. Memberikan insentif bagi para pelaksana
		4. Struktur Birokrasi	a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan b. Memberikan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi c. Memiliki tanggung jawab untuk bekerja

Sumber : Modifikasi Penulis 2011

## 2.6. Teknik Pengukuran

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indicator penelitian dengan menggunakan *Skala Likert*. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut variabel penelitian. Adapun variabel penelitian adalah tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)

Dengan *Skala Likert*, maka variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2007:107).

Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, atau dari baik sampai kurang baik, yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan peranan dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor :

No	Kategori	Skor
1	Sangat Baik	5
2	Baik	4
3	Cukup Baik	3
4	Kurang Baik	2
5	Tidak Baik	1

Kemudian untuk menganalisis masing-masing indikator variabel penelitian terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Tertinggi	: Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi
Sor Terendah	: Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah
Interval	: $\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Skala}}$

Dari formula diatas, dapat diketahui bahwa dari 5 sub indikator yaitu :

$$\text{Skor Tertinggi} : 3 \times 105 \times 5 = 1575$$

$$\text{Skor Terendah} : 3 \times 105 \times 1 = 315$$

$$\text{Interval} : \frac{1575 - 315}{5} = 252$$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator variabel tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis), maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang dinilai dari 105 responden dengan skor tertinggi 1575 dan skor terendah 315 dengan interval 252 dapat dinyatakan:

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1323-1575

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1071-1322

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 820-1070

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 567-819

Tidak Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 315-566

2. Sumber Daya, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang dinilai dari 105 responden dengan skor tertinggi 1575 dan skor terendah 315 dengan interval 252 dapat dinyatakan :

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1323-1575

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1071-1322

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 820-1070

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 567-819

Tidak Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 315-566

3. Disposisi, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang dinilai dari 105 responden dengan skor tertinggi 1575 dan skor terendah 315 dengan interval 252 dapat dinyatakan:

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1323-1575



Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1071-1322

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 820-1070

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 567-819

Tidak Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 315-566

4. Struktur Birokrasi, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang dinilai dari 105 responden dengan skor tertinggi 1575 dan skor terendah 315 dengan interval 252 dapat dinyatakan:

Sangat Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1323-1575

Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 1071-1322

Cukup Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 820-1070

Kurang Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 567-819

Tidak Baik : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada pada interval 315-566

Kemudian untuk menganalisis disiplin kerja pegawai pada kantor Camat Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula :

Skor Rata-rata Tertinggi	: Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi
Skor Rata-rata Terendah	: Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah
Interval	: $\frac{\text{Skor Rata-rata Tertinggi} - \text{Skor Rata-rata Terendah}}{\text{Skala}}$

Skor Rata-rata Tertinggi :  $4 \times 105 \times 5 = 2100$

Skor Rata-rata Terendah :  $4 \times 105 \times 1 = 420$

Interval :  $\frac{2100 - 420}{5} = 88$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui setiap rekapitulasi tanggapan responden terhadap Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap subindicator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator variable penelitian.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis), pengukurannya dengan 4 indikator variabel yang dinilai dengan skor rata-rata tertinggi 2100 dan skor rata-rata terendah 420 dengan nilai interval 336, dapat dinyatakan:

Sangat Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 1764-2100

- Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 1428-1763
- Cukup Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 1092-1427
- Kurang Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 756-1091
- Tidak Baik : Apabila Jumlah Skor Rata-Rata Yang Diperoleh Dari Responden Berada Pada Interval 420-755

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang mana melakukan penelitian langsung ke Kecamatan Rupert guna mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terinci bagaimana adanya tentang permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti.

#### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2012. Adapun maksud penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Rupert tersebut adalah karena Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kawasan hutan mangrove yang lebih luas dari beberapa wilayah kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan kondisi hutan mangrove yang paling memprihatinkan.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Data Primer**

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan kerangka penelitian ini yaitu Dinas Kehutanan dan Dinas-dinas terkait beserta masyarakat di lingkungan Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert. Data primer itu berupa data tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Kasus Tentang Hutan

Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis), yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

### **3.3.2. Data Sekunder**

Adalah data pendukung yang telah ada atau tersedia seperti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian, berupa data mengenai monografi kabupaten, monografi kecamatan serta data-data pendukung lain yang dianggap perlu.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang di peroleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik, dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

#### **3.4.1. Interview ( Wawancara )**

Yaitu teknik untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Pegawai Dinas terkait dan Masyarakat guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam Penelitian ini unsur pelaksana program yang berjumlah 5 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis, Camat Rupat dan Sekretaris Camat Rupat penulis melakukan wawancara langsung ke instansi

terkait dengan cara menemui dan melakukan tanya jawab kepada responden. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam mengambil data yang diperlukan dalam menarik kesimpulan.

#### **3.4.2. Kuesioner ( Angket )**

Menurut Sugiyono (2007:162) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Hal tersebut untuk mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Dalam Penelitian ini penulis menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat di Kecamatan Rupat baik menemui langsung maupun di bantu oleh pihak desa untuk menyebarkannya, kuisisioner tersebut dalam waktu 3 hari baru terkumpul keseluruhannya.

#### **3.4.3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

### **3.5. Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2007 : 90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis), yang terdiri dari Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis serta masyarakat yang ada di Kecamatan Rupert.

### **3.5.2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2007:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Bila populasi besar maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Keberhasilan dalam suatu penelitian sangat tergantung dari metode penelitian yang dipakai, sebab kekeliruan dalam memilih metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian akan menjadi keliru atau tingkat validitasnya diragukan. Demikian juga halnya dengan proses pengambilan sampel. Penarikan sampel yang tidak representatif akan berakibat kepada generalisasi hasil penelitian yang keliru.

Adapun untuk teknik penarikan sampel dari keseluruhan populasi, yang dijadikan sampel pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

1. Unsur pelaksana program implementasi kebijakan yaitu Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis dan Kantor Camat Rupert

## 2. Masyarakat di Kecamatan Rupert.

Adapun dalam penarikan sampel untuk unsur pelaksana program implementasi kebijakan yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis dan Kantor Camat Rupert, penulis menggunakan Teknik Random Sampling Purposive yaitu teknik yang dipakai untuk menentukan sampel melalui pertimbangan tertentu untuk tujuan yang telah ditentukan yaitu dengan memilih orang-orang yang dianggap lebih mengetahui tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2007 : 96).

Sedangkan untuk masyarakat kecamatan rupert penulis menggunakan Pengambilan sampel dari populasi menggunakan Teknik Slovin Sampel dimana dalam menentukan sampel ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

$e^2$  = Tingkat Kesalahan (0,1) / 10% dari jumlah populasi.

Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi di atas adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{30.550}{1 + 30.550 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{30550}{1 + (30.550 \times 0,01)}$$



$$n = \frac{30550}{306,5}$$

$n = 99,67$  jadi di genapkan menjadi 100 orang.

Dari rumus slovin sampel di atas dapat kita ketahui bahwa sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 100 orang atau 0,32% dari 30.550 orang jumlah populasi masyarakat di Kecamatan Rupert. Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 : Jumlah Populasi dan Sampel yang dijadikan Responden**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis	1	1	0,95
2	Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis	1	1	0,95
3	Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis.	1	1	0,95
4	Camat Rupert	1	1	0,95
5	Sekretaris Camat Rupert	1	1	0,95
6	Masyarakat Kecamatan Rupert	30.550	100	95,23
<b>Jumlah</b>		<b>30.555</b>	<b>105</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2011*

Jadi dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel secara keseluruhan berjumlah 105 orang yang diperoleh dari unsur pelaksana program implementasi kebijakan sebanyak 5 orang atau 4,76% dari populasi dan Masyarakat Kecamatan di Rupert sebanyak 100 orang atau 95,23% dari jumlah keseluruhan populasi.

### **3.6. Analisis Data**

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan metode dengan cara statistik deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk menarik suatu kesimpulan dari penelitian (Sugiyono, 2007 : 169). Dimana setelah data dilapangan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan untuk kemudian dianalisa secara kuantitatif bersifat diskriptif dengan menghitung jumlah rata-rata skor menggunakan skala interval. Kemudian hasil penelitian ditambah dengan hasil wawancara serta keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian baru kemudian ditarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Singkat Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten tertua di Propinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera pada posisi antara  $2^{\circ} 30' - 0^{\circ} 56'$  Lintang Utara dan  $100^{\circ} 52' - 102^{\circ} 31'$  Bujur Timur. Kabupaten bengkalis memiliki luas wilayah  $\pm 8.417 \text{ km}^2$  atau 9,3% dari luas Provinsi Riau yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 tercatat sebanyak 484.757 jiwa yang terdiri dari 250.265 jiwa laki-laki dan 234.492 jiwa perempuan.

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Kabupaten Bengkalis memiliki 34 sungai, 10 tasik atau danau dan 16 pulau besar dan kecil. Ke-16 pulau tersebut terdiri dari dua pulau besar, yaitu pulau Bengkalis (938,40  $\text{Km}^2$ ) dan Pulau Rupat (1.525  $\text{Km}^2$ ). Sedangkan 14 pulau lainnya merupakan pulau kecil, yaitu pulau Atung, Mampu Beso, Payung, Mentele, Baru, Rampang dan Mampu Kecil yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rupat Utara.

Kabupaten Bengkalis memiliki 8 Kecamatan yang terdiri dari 102 desa/kelurahan. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Selat Malaka

## **4.2. Gambaran Umum Kecamatan Rupert**

### **4.2.1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Rupert merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkalis, guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan maka pada tahun 1996 dibentuklah Perwakilan Kecamatan yang berkedudukan di Desa Batu Panjang. Pada tanggal 6 Januari 1996 pemerintah Kabupaten Bengkalis mengambil keputusan merubah status Perwakilan Kecamatan menjadi Kecamatan definitif dengan nama Kecamatan Rupert. Kecamatan Rupert terletak pada pantai timur pulau sumatera dengan posisi  $0^{\circ} 17' - 2^{\circ} 30'$  Lintang Utara dan  $100^{\circ} 52' - 102^{\circ} 10'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah  $424,40 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 32.667 jiwa. Kecamatan Rupert berada pada ketinggian antar 1 sampai 4 meter di atas permukaan laut yang terdiri dari 12 kelurahan/desa yaitu : Batu Panjang, Tanjung Kapal, Terkul, Pergam, Sukarjo Mesim, Darul aman, Makeruh,

Pangkalan Nyirih, Sungai Cingam, Hutan Panjang, Teluk Lecah dan Parit Kebumen.

Wilayah Pulau Rupert merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Secara administratif, Pulau Rupert berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rupert Utara dan Kecamatan Bengkalis
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Dumai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Kecamatan Rupert hampir seluruh wilayahnya merupakan daratan rendah yang banyak ditumbuhi hutan tropis dengan temperatur antara  $26^{\circ} - 32^{\circ}$  C. Pulau Rupert berada di sebelah timur Pulau Sumatera dengan luas wilayah 1,524.55 km<sup>2</sup>. KTM Pulau Rupert terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara. Kecamatan Rupert meliputi 12 desa/kelurahan dan Kecamatan Rupert Utara meliputi 5 desa/kelurahan.

Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupert merupakan pulau yang dikelilingi oleh laut dan selat. Berdasarkan posisinya tersebut, sebagian besar desa/kelurahan di kecamatan Rupert berada di pesisir pantai, hanya Desa Parit Kebumen yang terletak di daratan serta Desa Pangkalan Nyirih dan Hutan Panjang yang berada di daerah aliran sungai. Selain itu, dikarenakan letak Kecamatan Rupert yang sebagian besar daerahnya berada dipesisir pantai maka dapat dilihat bahwa banyaknya penyebaran ekosistem hutan mangrove.

#### 4.2.2. Kondisi Demografi

##### 4.2.2.1. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Penduduk di Kecamatan Rupert selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Adapun jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rupert menurut data tahun 2011 berjumlah sebanyak 30.550 jiwa yang terdiri dari 15.747 jiwa adalah laki-laki dan 14.803 jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Rupert secara total adalah sebanyak 36,53 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan desa terpadat adalah Kelurahan Batu Panjang yaitu 144 jiwa per Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Rupert Menurut Kelurahan/Desa**

No	Desa	Penduduk		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Batu Panjang	1.947	1.866	3.813	12,48
2	Terkul	1.847	1.688	3.535	11,57
3	Tanjung Kapal	1.650	1.522	3.172	10,38
4	Pergam	988	956	1.944	6,36
5	Sukarjo Mesim	682	669	1.351	4,42
6	Darul aman	984	798	1.782	5,83
7	Makeruh	662	664	1.326	4,34
8	Pangkalan Nyirih	2.212	2.120	4.332	14,18
9	Sungai Cingam	1.032	1.041	2.073	6,78
10	Hutan Panjang	1.542	1.434	2.976	9,74
11	Parit Kebumen	685	581	1.266	4,14
12	Teluk Lecah	1.516	1.584	3.100	10,14
<b>Jumlah</b>		<b>15.747</b>	<b>14.803</b>	<b>30.550</b>	<b>100%</b>

Sumber : UPTD Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Transmigrasi Kec. Rupert 2012.

Jika dilihat keadaan penduduk Kecamatan Rupert berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS/Honorer	280	4,88
2	TNI/POLRI	157	2,73
3	Wiraswasta	785	13,69
4	Tani	616	10,74
5	Nelayan	343	5,98
6	Tukang	312	5,44
7	Peternak	234	4,08
8	Buruh	2.739	47,78
9	Penjahit/pengrajin	40	0,69
10	Pemulung	26	0,45
<b>Jumlah</b>		<b>5.732</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kecamatan Rupert Dalam Angka Tahun 2012*

#### 4.2.2.2. Agama

Dibidang keagamaan Kecamatan Rupert merupakan salah satu Kecamatan yang sangat berpegang dengan nilai-nilai keagamaan dan agama Islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian bukan berarti di Kecamatan Rupert tidak ada yang Beragama non islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 : Distribusi Penduduk Kecamatan Rupert Menurut Agama**

No	Agama Yang Dianut	Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	12.857	12.127	24.984	81,78
2	Protestan	645	538	1.183	3,87
3	Katholik	183	153	336	1,09
4	Hindu	-	3	3	0,01
5	Budha/Konghucu	2.062	1.982	4.044	13,23
<b>Jumlah</b>		<b>15.747</b>	<b>14.803</b>	<b>30.550</b>	<b>100%</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis Dalam Angka Tahun 2012*

Dengan adanya beragam agama secara otomatis akan berdampak pada adanya beberapa rumah ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4 : Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Rupert**

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Masjid	47	43,51
2	Mushalla	45	41,66
3	Gereja	10	9,25
4	Vihara/Klenteng	6	5,55
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>	<b>100%</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bengkalis Dalam Angka Tahun 2012*

#### **4.2.2.3. Pendidikan**

Pengembangan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini yang sangat berperan adalah dinas pendidikan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka kualitas seseorang tersebut semakin tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah mengalokasikan 20 % dari dana APBD untuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber daya manusia Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkalis memberikan prioritas yang sama untuk setiap Kecamatan dalam bidang pendidikan, hal ini dapat dilihat dengan tersebarnya sarana pendidikan di setiap Kecamatan.

Untuk melihat pendidikan yang terdiri dari sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang ada di setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Rupert dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 4.5 : Sarana Pendidikan di Kecamatan Rupert**

No	Tingkat dan Jenis Pendidikan	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1	Taman Kanak-Kanak	14	14,89
2	SD	33	35,10
3	MDA	26	27,65
4	SMP	8	8,51
5	MTS	6	6,38
6	SMA	3	3,19
7	SMK	1	1,06
8	MA	3	3,19
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100%</b>

*Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Rupert Dalam Angka Tahun 2012*

Disamping sarana pendidikan yang memadai pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan sumber daya manusia juga didukung oleh tenaga pengajar, adapun jumlah tenaga pengajar yang ada di Kecamatan Rupert dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 4.6 : Tenaga Pendidik di Kecamatan Rupert**

No	Tingkat dan Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Taman Kanak-Kanak	55	5,40
2	SD	432	42,43
3	MDA	197	19,35
4	SMP	109	10,70
5	MTS	99	9,72
6	SMA	49	4,81
7	SMK	30	2,94
8	MA	47	4,61
<b>Jumlah</b>		<b>1.018</b>	<b>100%</b>

*Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Rupert Dalam Angka Tahun 2012*

#### **4.2.2.4. Kesehatan**

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah dan merata. Dengan

meningkatkan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah Kecamatan Rupert dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.7 : Jumlah Sarana Kesehatan Yang Ada di Kecamatan Rupert**

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Puskesmas	1	6,25
2	Puskesmas Pembantu	9	56,25
3	Posyandu	4	25
4	Poskesdes	2	12,5
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>100%</b>

*Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Rupert Dalam Angka Tahun 2012*

Selain menyediakan fasilitas kesehatan pemerintah Kabupaten Bengkulu juga mempersiapkan tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan dan lain-lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8 : Jumlah Tenaga Medis Yang Ada di Kecamatan Rupert**

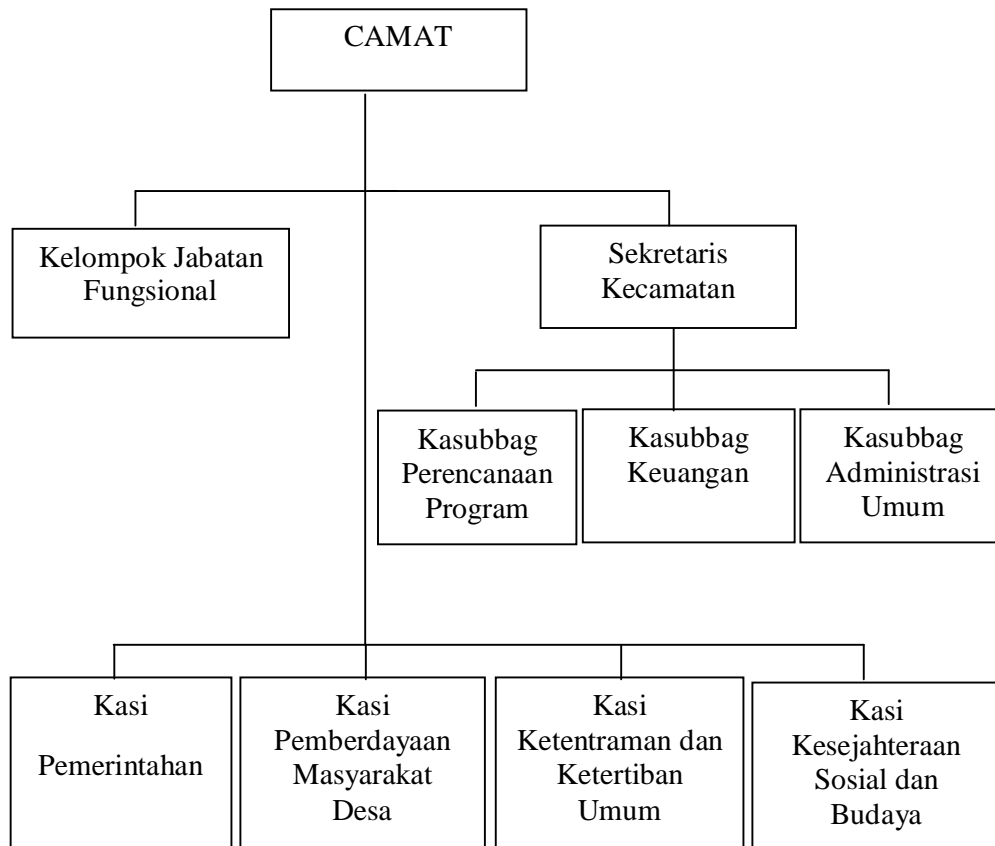
No	Jenis	Jumlah	Persentase (%)
1	Dokter Umum	7	7,60
2	Dokter Gigi	1	1,08
3	Bidan	12	13,04
4	Apoteker	16	17,39
5	Dukun Bayi	56	60,86
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	<b>100%</b>

*Sumber : UPTD Dinas Kesehatan Kecamatan Rupert Dalam Angka Tahun 2012*

#### **4.3. Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert**

Adapun Struktur Organisasi yang ada di Kantor Camat Rupert, dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Gambar 4.1 : Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rupert Tahun 2012**



*Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Bagan Susunan Organisasi Kecamatan*

#### **4.4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Rupert**

Kecamatan Rupert merupakan suatu unsur pemerintahan yang berada dibawah naungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, mempunyai tugas pokok menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara teknis maupun administrasi. Maka dari itu, diperlukan susunan organisasi dan tata kerja yang baik guna menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara terperinci dan sistematis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dijelaskan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan juga bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun uraian tugas dan fungsi Kecamatan Rupert adalah sebagai berikut :

#### 1. Camat

Adapun tugas dan fungsi Camat adalah :

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.
- b. Melaksanakan kewenangan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten

- c. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten

## 2. Sekretaris Kecamatan

Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Camat Dalam Melakukan Pembinaan Administrasi Dan Memberikan Pelayanan Teknis Administrative Kepada Seluruh Perangkat/Satuan Organisasi Kecamatan.
- b. Melakukan Pembinaan Dan Bimbingan Kepada Seluruh Pegawai Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Pencapaian Tujuan Organisasi.
- c. Melakukan Koordinasi Disetiap Kegiatan Dengan Instansi Lainnya.
- d. Pembinaan Terhadap Unit Pelayanan Terpadu (UPT) .
- e. Melaksanakan Pembinaan Administrasi Umum Dan Keuangan .

## 3. Kasubbag Perencanaan Program

Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Perencanaan Program adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan Program Kegiatan Kecamatan Dan Sub Bagian Perencanaan Program Pada Kantor Camat Rupert.
- b. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan rencana kerja/program tahunan (RKT), Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Camat Rupert.
- c. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan sampai menjadi DPA dengan persiapan revisi.

- d. Mengupayakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada Kantor Camat Rupert.
- e. Melaksanakan pengelolaan dan mendistribusikan raskin.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seccam dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 4. Kasubbag Keuangan

Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kegiatan kecamatan dan sub bagian keuangan pada kantor Camat Rupert.
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, membuat laporan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap administrasi keuangan pada Kantor Camat Rupert.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekcam dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 5. Kasubbag Administrasi Umum

Adapun tugas dan fungsi Kasubag Administrasi Umum adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Kecamatan dan sub bagian administrasi umum pada Kantor Camat Rupert.
- b. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.

- c. Mengatur urusan rumah tangga dan tugas keprotokolan pada Kantor Camat Rupert.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekcam dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 6. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas administrasi dibidang pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kelurahan Pemerintahan Desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan pada Kantor Camat Rupert.
- b. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi pada Kantor Camat Rupert.
- b. Mengkoordinir dan melakukan pendataan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah Kecamatan.

- c. Penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- d. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana ADD Desa dan melakukan evaluasi kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan.
- f. Melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Adapun tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga diwilayah kecamatan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, HUT Bengkalis dan peringatan hari besar lainnya.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT dan jamkesmas kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



#### 9. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun tugas dan fungsi Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan dan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian izin gangguan (HO).
- c. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan.
- d. Melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa diwilayah Kecamatan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian dari fungsi camat sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Responden

Demi menunjang keakuratan penelitian dalam rangka mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert, maka perlu disajikan identitas responden dari unsur Pegawai Dinas dan Masyarakat yang menyangkut jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

##### 5.1.1. Jenis Kelamin Responden

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.1 : Jumlah Responden (Masyarakat dan Pegawai Dinas) Menurut Jenis Kelamin**

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pegawai Dinas	5	-	5	4,76
2	Masyarakat	71	29	100	95,23
Jumlah		76	29	105	100%

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini adalah laki-laki, di mana responden laki-laki dari Pegawai Dinas berjumlah 5 orang atau sebesar 100% dan tidak adanya perempuan sedangkan dari pihak

Masyarakat laki-laki berjumlah 56 orang atau 71% dan perempuan 29 orang atau 29%.

### 5.1.2. Tingkat Umur Responden

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan cenderung semakin baik pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 5.2 : Identitas Responden Pegawai Dinas dan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	21 – 30	57	54,28
2	31 – 40	30	28,57
3	41 – 50	13	12,38
4	51 – 60	3	2,85
5	60 Tahun Keatas	2	1,90
	<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat umur responden dalam penelitian ini paling banyak adalah umur 21 – 30 yaitu sebanyak 57 orang atau 57%, kemudian responden dengan tingkat umur 31-40 yaitu sebanyak 30 orang atau 28,57%. Adapun responden dengan tingkat umur 41-50 yaitu sebanyak 13 orang atau 12,38% serta responden dengan tingkat umur 41-60 yaitu sebanyak 3 orang atau 12,38%. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang berumur 60 tahun keatas yaitu sebanyak 2 orang atau 2%.

### 5.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk terciptanya keserasian dalam melaksanakan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3 : Identitas Responden Pegawai Dinas Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Magister (S2)	3	60
2	Strata Satu (S1)	-	-
3	DIPLOMA	-	-
4	SMA	2	40
5	SMP	-	-
6	SD	-	-
7	Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan pegawai dinas dalam penelitian mayoritas merupakan seorang magister (S3) yaitu sebanyak 3 orang atau 60% dan yang tamat SMA yaitu sebanyak 2 orang atau 40%.

**Tabel 5.4. : Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Magister (S2)	-	-
2	Strata Satu (S1)	5	5
3	DIPLOMA	3	3
4	SMA	47	47
5	SMP	32	32
6	SD	10	10
7	Tidak Tamat SD/tidak sekolah	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu tidak adanya Magister, sarjana sebanyak 5 orang atau 5%, yang Diploma sebanyak 3 orang atau 3% sedangkan yang SLTA sederajat sebanyak 47 orang atau 47% , yang SLTP sederajat sebanyak 32 orang atau 32% dan yang tamat SD sebanyak 10 orang atau 10% serta yang tidak sekolah atau tidak tamat SD sebanyak 3 orang atau 3%.

Dari gambaran diatas jelas bahwa responden yang paling banyak adalah tamat SMA sederajat yaitu sebanyak 47 orang atau 47%. Hal ini disebabkan karena responden dari penelitian ini sebagian besar adalah masyarakat, dari gambaran tersebut terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Rupat sudah memiliki tingkat pendidikan yang lumayan memadai.

## **5.2.Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove Di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.**

Hutan mangrove merupakan vegetasi yang khas terdapat di daerah pantai tropis. Vegetasi mangrove umumnya tumbuh subur di daerah pantai yang landai di dekat mara sungai dan pantai yang terlindung dari kekuatan gelombang. Karakteristik habitat yang menonjol di daerah hutan mangrove diantaranya adalah jenis tanah berlumpur, berlempung atau berpasir, lahan tergenang air laut secara periodic, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat seperti dari sungai, mata air dan air tanah, airnya payau. Adanya faktor lingkungan tersebut menyebabkan habitat mangrove bersifat spesifik yang hanya dapat ditempati oleh

jenis tumbuhan dan fauna tertentu yang telah teradaptasi dengan lingkungan setempat.

Hutan mangrove mempunyai fungsi fisik dan fungsi ekologi yang penting bagi kelestarian ekosistem didaerah pesisir. Secara fisik, hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari pengaruh gelombang laut. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah asuhan (*nursery ground*), daerah pemijahan (*spawning ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) bagi beranekaragam biota perairan seperti ikan, udang dan kepiting.

Kecamatan Rupert merupakan salah satu Kecamatan yang terletak dipesisir Kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah hutan mangrove yang cukup luas yaitu sekitar 5.323 Hektar (Tahun 2010) yang tersebar di desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Rupert. Namun karena banyaknya areal lahan mangrove yang telah mengalami pengalihfungsian baik itu untuk pembuatan jalan, perkebunan, perikanan, untuk lahan pemukiman maupun penebangan yang bersifat komersial baik yang dilakukan orang pribadi maupun pihak-pihak tertentu hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert menjadi banyak berkurang. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah lagi, maka Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah berupaya untuk menyelamatkan komunitas mangrove yang tersebut khususnya di Kecamatan Rupert yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. Dalam hal implementasi Peraturan Pemerintah tersebut dalam rangka untuk melindungi hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert penulis menggunakan teori dari George C. Edward ( Edward III ) dalam Agustino (2006:157-158) yang

mengatakan bahwa ada empat empat faktor atau indikator yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

### **5.2.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Bengkalis mensosialisasikan kebijakan tentang perlindungan hutan khususnya hutan mangrove kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Rupat, sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah daerah.

Disamping adanya sosialisasi, pemerintah daerah juga harus menyampaikan informasi mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove, karena dengan adanya informasi tersebut masyarakat jadi mengetahui betapa pentingnya manfaat hutan mangrove bagi kehidupan terutama bagi yang berdomisili disekitar garis pantai sehingga masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikan keberadaan hutan mangrove tersebut. Selanjutnya, dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang perlindungan hutan

tersebut maka bagi setiap masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi.

Sehubungan dengan kriteria penilaian tentang komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert, mencakup beberapa sub indikator yaitu :

### **1.Mengadakan Sosialisasi Terhadap Kebijakan Tentang Perlindungan Hutan Mangrove**

Sosialisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Karena sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini adalah proses transfer nilai dan aturan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Rupert tentang peraturan yang akan ditetapkan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai sosialisasi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.5 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengenai Perlindungan Hutan Mangrove**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi ( F )</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sangat Baik	6	5,71
2	Baik	18	17,14
3	Cukup Baik	10	9,52
4	Kurang Baik	43	40,95
5	Tidak Baik	28	26,67
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang menyatakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten bengkalis mengenai perlindungan hutan mangrove berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 6 orang atau 5,71% dan yang menyatakan Baik 18 orang atau 17,14%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 10 orang atau 9,52% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 43 orang atau 40,95%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 28 orang atau 26,67%. Jadi dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten bengkalis mengenai perlindungan hutan mangrove berada pada kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 43 orang atau 40,95%.

Hasil tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat di Kelurahan Tanjung kapal yaitu Bapak Ngaliman mengatakan bahwa :

*“Masyarakat jarang diberitahu secara langsung akan adanya sosialisasi jikaalaupun ada pemerintah kurang serius dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Selain itu sosialisasi hanya sebatas sosialisasi tanpa ada kegiatan secara langsung dilapangan sehingga hanya sebagian kecil yang peduli dan mengerti apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut.” (hasil wawancara dengan Bapak Ngaliman Pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2012).*

Adapun hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Kecamatan Rupert yaitu Bapak Sapon, SH, MM, beliau mengatakan bahwa :

*“Pemerintah daerah telah berupaya melakukan sosialisasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan atau acara sosialisasi di aula Kantor Camat Rupert dan juga menyebarkan surat edaran mengenai penerapan kebijakan tersebut yang disampaikan kepada seluruh Kepala Desa di Kecamatan Rupert untuk diteruskan kepada masyarakat banyak.” (hasil wawancara dengan Bapak Sapon, SH, MM pada Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2012).*

Dari hasil wawancara diatas sebenarnya pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi kebijakan tentang perlindungan hutan mangrove tetapi pemerintah kurang serius dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga proses sosialisasi yang dilakukan kurang berhasil sesuai dengan yang diharapkan, sehingga upaya pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupat kurang berhasil dengan baik.

## **2.Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Mengenai Pentingnya Melestarikan Hutan Mangrove**

Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove. Dengan demikian masyarakat jadi mengetahui tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi kehidupan kita dan lingkungan sekitar sehingga masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pemberian informasi mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.6 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Informasi Tentang Pentingnya Melestarikan Hutan Mangrove**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	5,71
2	Baik	15	14,28
3	Cukup Baik	10	9,52
4	Kurang Baik	46	43,81
5	Tidak Baik	28	26,67
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden menyatakan bahwa pemberian informasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis tentang pentingnya melestarikan hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 6 orang atau 5,71% dan yang menyatakan Baik 15 orang atau 14,28%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 10 orang atau 9,52% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 46 orang atau 43,81%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 28 orang atau 26,67%. Jadi dari hasil tanggapan responden diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis tentang pentingnya melestarikan hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 46 orang atau 43,81%.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanggapan responden tentang sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis tentang kebijakan perlindungan hutan mangrove di kecamatan Rupert, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat dan Pegawai Dinas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Rupert yaitu Bapak Yusrizal S.Sos, beliau mengatakan bahwa :

*“Semua proses komunikasi sudah dilakukan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk sosialisasi, pemberian informasi mengenai pentingnya hutan mangrove maupun mengenai sanksinya, semuanya sudah kita sampaikan kepada masyarakat.”(hasil wawancara dengan Bapak Yusrizal, S.Sos pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2012).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Masyarakat di Kelurahan Batu Panjang yaitu Bapak Solihun mengatakan bahwa :

*“Masyarakat jarang mendengar informasi yang berkaitan dengan adanya upaya dari pemerintah dalam memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove, pemerintah hanya datang pada waktu tertentu saja dan kedatangannya selalu tidak diketahui oleh masyarakat luas hanya kalangan tertentu saja. Selain itu pemerintah hanya memberikan informasi hanya berbentuk pengumuman yang ditempel dan plang yang didalamnya berisi informasi tentang hutan mangrove.” (hasil wawancara dengan Bapak Solihun pada Hari Jum’at Tanggal 17 Februari 2012).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah memang sudah memberikan informasi mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove kepada masyarakat tetapi pelaksanaannya saja yang kurang berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari pemerintah yang jarang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove, baik itu tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi kehidupan dan lingkungan sehingga kerusakan hutan mangrove tetap saja terjadi. Maka dari itu agar hutan mangrove tetap terjaga dari setiap kerusakan pemerintah harus sering memberikan informasi mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove kepada masyarakat agar kelestarian hutan mangrove tetap terjaga dengan baik dan terhindar dari kerusakan.

### **3. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Mengenai Sanksi Bagi Yang Merusak Hutan Mangrove.**

Dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang merusak hutan mangrove, maka masyarakat masyarakat akan mengetahui akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat akan sangat berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut perambahan hutan mangrove secara illegal. Untuk

mengetahui tanggapan responden mengenai pemberian informasi tentang sanksi yang diberlakukan bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.7 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Informasi Sanksi Kepada Masyarakat Bagi Yang Merusak Hutan Mangrove.**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	4,76
2	Baik	17	16,19
3	Cukup Baik	9	8,57
4	Kurang Baik	46	43,81
5	Tidak Baik	28	26,67
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden menyatakan bahwa pemberian informasi mengenai sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang merusak hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 5 orang atau 4,76% dan yang menyatakan Baik 17 orang atau 16,19%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 9 orang atau 8,57% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 46 orang atau 43,81%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 28 orang atau 26,67%.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang menyatakan bahwa pemberian informasi mengenai sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang merusak hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 46 orang atau 43,81%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Drs. Ismail, MP beliau mengatakan bahwa :

*“Pemerintah Kabupaten Bengkalis Melalui Dinas terkait yaitu Dinas Perkebunan dan Kehutanan sudah memberikan informasi akan sanksi yang diterima bila kedapatan merusak ekosistem dari hutan baik yang kecil maupun besar. Pemerintah sudah berkerja sama dengan media massa dan elektronik. Selain itu, pemerintah menempel pada papan-papan pengumuman seperti plang-plang dan pengumuman yang ditempel di tempat-tempat umum agar masyarakat bisa membaca dan mengerti akan adanya sanksi yang diterima bila kedapatan merusak ekosistem dari hutan”. (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ismail, MP pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2012).*

Sedangkan melalui hasil wawancara penulis dengan Masyarakat di Desa Darul Aman yaitu Bapak Safuan mengatakan bahwa :

*“Dalam memberikan informasi tentang sanksi, pemerintah tidak terjun secara langsung hanya sebatas plang-plang, dan mulut kemulut saja, tidak ada pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat awam yang tidak mengetahui akan adanya sanksi tersebut, masyarakat berfikir bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan mereka untuk tidak memanfaatkan hasil hutan mangrove untuk kepentingan mereka, selain itu bagi masyarakat yang mengetahui akan sanksi terlihat tidak peduli disebabkan mata pencaharian yang bergantung pada hasil dari hutan tersebut” (hasil wawancara dengan Bapak Safuan pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 2012)*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah sudah memberikan informasi mengenai sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang merusak hutan mangrove tetapi dalam memeberikan informasi tersebut pemerintah tidak langsung turun kelapangan hanya melalui media-media massa dan elektronik. Maka dari itu, pemerintah seharusnya selain dengan menggunakan media massa pemerintah juga harus turun sendiri kelapangan agar proses pemberian informasi mengenai sanksi bagi yang merusak hutan mangrove dapat

berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hutan mangrove dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert, penulis sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Rangka Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2009**

No	Indikator	Jawaban 105 Responden				
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan tentang perlindungan hutan mangrove	6	18	10	43	28
2	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove	6	15	10	46	28
3	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sanksi bagi yang melanggar peraturan	5	17	9	46	28
<b>Skor</b>		<b>17 (5)</b>	<b>50 (4)</b>	<b>29 (3)</b>	<b>135 (2)</b>	<b>84 (1)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>200</b>	<b>87</b>	<b>270</b>	<b>84</b>
<b>Jumlah Skor</b>		<b>726</b>				
<b>Interval skor</b>		<b>567 - 819 ( Kurang Baik )</b>				

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 3 sub indikator yang diteliti dari indikator Komunikasi, tanggapan responden yang menyatakan Sangat Baik

berjumlah 85, kemudian yang menyatakan Baik sebanyak 200 dan yang menyatakan Cukup Baik berjumlah adalah 87, adapun yang menyatakan Kurang Baik adalah sebanyak 270 dan yang menyatakan Tidak Baik berjumlah 84. Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 3 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator Komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat mendapat jumlah skor 726 dan dinyatakan dalam kategori “*Kurang Baik*” (567 – 819).

Hasil tanggapan responden diatas sesuai dengan rangkuman hasil wawancara penulis dengan responden yaitu sebagai berikut :

1. pemerintah kurang serius dalam memberikan sosialisasi sehingga kerusakan dari ekosistem hutan mangrove tetap terjadi dan berkelanjutan,
2. jarang nya proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove,
3. pemerintah tidak langsung turun kelapangan hanya melalui media-media massa dan elektronik.

### **5.2.2. Sumber Daya**

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi suatu kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi



kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan tersebut, yang meliputi :

### **1.Menyediakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Sebagai Pelaksana Kebijakan**

Sumber Daya Manusia adalah manusia yang berkerja dalam suatu lingkungan atau organisasi yang dapat disebut juga pegawai, karyawan, personil, dan lain lain. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset yang sangat penting didalam suatu organisasi atau instansi dimana Sumber Daya Manusia sebagai unsur pelaksana dalam mencapai tujuan yang ada dalam organisasi atau instusi tersebut. Sumber Daya Manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sebagai pelaksana kebijakan, tanpa sumber daya manusia yang memadai maka implementasi suatu kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah tersebut.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan tentang perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert, penulis sajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.9 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Sebagai Pelaksana Kebijakan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	1,90
2	Baik	20	19,05
3	Cukup Baik	24	22,86
4	Kurang Baik	31	29,52
5	Tidak Baik	28	26,67
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden yang menyatakan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan dalam perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 2 orang atau 1,90% dan yang menyatakan Baik 20 orang atau 19,05%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 24 orang atau 22,48% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 31 orang atau 29,52%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 28 orang atau 26,67%. Jadi dapat disimpulkan tanggapan responden yang menyatakan yang menyatakan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan dalam perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada pada kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 31 orang atau 29,52%.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Masyarakat di Kelurahan Tanjung kapal yaitu Bapak Hasan Basri mengatakan bahwa :

*“Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan kurang berkualitas dan berkompeten sesuai bidangnya, dalam pelaksanaan suatu kebijakan contohnya menangani setiap permasalahan yang terjadi di lapangan misalnya hutan mangrove yang mengalami*

*kerusakan baik oleh alam maupun manusia tidak segera ditangani dengan baik”. (hasil wawancara dengan bapak Hasan Basri pada Hari Senin 13 Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Rupert yaitu Bapak Yusrizal, S.Sos beliau mengatakan bahwa :

*“Pemerintah daerah sudah berusaha untuk menyediakan atau menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai implementator kebijakan tersebut, pemerintah daerah menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang masing-masing.” (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ismail, MP pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2012).*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah berusaha untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan namun dalam kenyataannya sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan dinilai kurang berkualitas kurang berkualitas dan berkompeten sesuai bidangnya. Hal tersebut terlihat dari kerja mereka yang kurang maksimal dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Maka dari itu, pemerintah harus lebih serius dan tepat dalam menunjuk sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan untuk menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## **2.Menyediakan Fasilitas Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Disamping adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan, juga harus didukung dengan penyediaan fasilitas yang di

perluan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena tanpa adanya Sarana dan Prasarana pendukung maka kebijakan tidak akan terlaksana secara baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai tersedianya fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.10 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tersedianya Fasilitas Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	9,52
2	Baik	18	17,14
3	Cukup Baik	37	35,24
4	Kurang Baik	31	29,52
5	Tidak Baik	9	8,57
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden menyatakan tersedianya fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 10 orang atau 9,52% dan yang menyatakan Baik 18 orang atau 17,14%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 37 orang atau 35,24% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 31 orang atau 29,52%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 9 orang atau 8,57%. Jadi dapat disimpulkan tanggapan responden yang menyatakan yang menyatakan tersedianya fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan mangrove dalam perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Cukup Baik yaitu sebanyak 37 orang atau 35,24%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat di Kelurahan Tanjung kapal yaitu Bapak Zainul Nasution mengatakan bahwa :

*“Mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pelaksana kebijakan terlihat sudah cukup baik itu berupa tempat maupun alat yang digunakan. Pemerintah memberikan fasilitas cukup untuk para pelaksana kebijakan sehingga mereka bisa berkerja dengan baik, ini terlihat dari gedung yang mereka tempati sudah cukup baik. hal ini jelas mempengaruhi kerja mereka dalam menjalankan setiap kebijakan yang diperintahkan oleh atasannya.” (Hasil wawancara dengan bapak Zainul Nasution Hari Selasa Tanggal 14 Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan Dinas Pekebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak H.Tarmizi Ahmad beliau mengatakan bahwa :

*“Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan seperti kantor UPTD yang ada disetiap kecamatan, hal tersebut dilakukan demi memperlancar setiap tugas mereka sebagai orang yang turun langsung kelapangan .” (hasil wawancara dengan Bapak H.Tarmizi Ahmad pada Hari Selasa Tanggal 6 Maret 2012)*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dalam menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan seperti gedung yang sudah ada dan lainnya. Karena semua sarana dan prasarana belum sepenuhnya tersedia maka dari itu pemerintah harus bisa menyediakan sarana prasarana yang belum ada dengan baik dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert.

### 3. Menyediakan Anggaran Yang Memadai Untuk Pelaksanaan Kebijakan

Disamping sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, yang tak kalah penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah adanya anggaran karena tanpa anggaran yang memadai suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan efektif. Hal inilah yang selalu menjadi faktor penyebab kurang berjalannya suatu kebijakan karena kebijakan yang dilaksanakan tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.11 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tersedianya Anggaran Yang Memadai Untuk Pelaksanaan Kebijakan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	9,52
2	Baik	20	19,05
3	Cukup Baik	32	30,48
4	Kurang Baik	32	30,48
5	Tidak Baik	11	10,48
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden menyatakan bahwa tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 10 orang atau 9,52% dan yang menyatakan Baik 20 orang atau 19,52%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik dan Kurang Baik berjumlah 32 orang atau 30,48%.

Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 11 orang atau 10,48%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan tertinggi responden yang menyatakan bahwa tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada pada kategori Cukup Baik dan Kurang Baik yaitu sebesar 32 orang atau 30,48%. Hal ini berarti bahwa tanggapan responden masih dapat dinyatakan Cukup Baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Masyarakat di Desa Mesim yaitu Bapak Basuki mengatakan bahwa :

*“Masyarakat menilai bahwa dari segi anggaran pemerintah daerah sudah memberikan anggaran yang cukup memadai untuk pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya alokasi dana dari APBD Kabupaten Bengkalis dalam pemberian gaji dan insentif yang diberikan kepada setiap pegawai demi memperlancar tugas pekerjaannya.(hasil wawancara dengan Bapak Basuki pada Hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Drs, Ismail, MP beliau mengatakan bahwa :

*“Anggaran dana untuk melakukan kegiatan seperti Reboisasi, Penghijauan, dan lain-lain, diusulkan oleh setiap dinas yang berwenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang bersumber pada APBD Kabupaten dan apabila kerusakan yang terjadi sudah parah dan meluas ke daerah kabupaten lain maka Dana juga diusulkan melalui APBD Provinsi melalui kerjasama antarpemerintah kabupaten”. (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ismail, MP pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2012).*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan seperti Reboisasi, Penghijauan, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu maka sudah seharusnya para pelaksana kebijakan harus bisa berkerja

dengan baik sesuai yang diharapkan dalam rangka menjalankan setiap kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Sumber Daya yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert secara keseluruhan baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan dan anggaran yang memadai, penulis sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sumberdaya Yang Disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis**

No	Indikator	Jawaban 105 Responden				
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas	2	20	24	31	28
2	Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan	10	18	37	31	9
3	Menyediakan anggaran yang memadai	10	20	32	32	11
<b>Skor</b>		<b>22 (5)</b>	<b>58 (4)</b>	<b>93 (3)</b>	<b>94 (2)</b>	<b>48 (1)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>	<b>232</b>	<b>279</b>	<b>188</b>	<b>48</b>
<b>Jumlah Skor</b>		<b>857</b>				
<b>Interval Skor</b>		<b>820 - 1070 ( Cukup Baik )</b>				

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 3 sub indikator yang diteliti dari indikator Sumber Daya, tanggapan responden yang menyatakan Sangat Baik berjumlah 110, kemudian yang menyatakan Baik sebanyak 232 dan yang menyatakan Cukup Baik berjumlah adalah 279. Adapun yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 188 serta yang menyatakan Tidak Baik berjumlah 48. Kemudian



bedasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator Sumber Daya yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat mendapat jumlah skor 857 dan dinyatakan dalam kategori “*Cukup Baik*”.

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara penulis dengan responden mengatakan sebagai berikut :

1. pelaksana kebijakan yang kurang berkualitas dan berkompeten dalam pelaksanaan suatu kebijakan,
2. Fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan sudah cukup memadai,
3. anggaran yang disediakan pemerintah kurang memadai dalam menjalankan setiap kebijakan.

### **5.2.3. Disposisi**

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk implementasi kebijakan tersebut, dalam hal ini adalah para pelaksana kebijakan yaitu aparatur pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adapun disposisi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah bagaimana bentuk kinerja dari pelaksana kebijakan yaitu aparat pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. Bentuk dari disposisi tersebut meliputi :

### **1. Pemahaman Dan Pengetahuan Para Pelaksana Kebijakan Terhadap Kebijakan Perlindungan Hutan Mangrove**

Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan sangat diperlukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, karena tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana niscaya kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini, pemahaman para pelaksana Kebijakan terhadap sangar diperlukan demi tercapainya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove Di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan baik. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.13 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Dan Pengetahuan Para Pelaksana Terhadap Kebijakan**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi ( F )</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sangat Baik	0	0
2	Baik	12	11,43
3	Cukup Baik	19	18,09
4	Kurang Baik	53	50,48
5	Tidak Baik	21	20
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada pada kategori Sangat Baik tidak ada atau 0% dan yang menyatakan Baik 12 orang atau 11,43%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 19 orang atau 18,09% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 53 orang atau 50,49 dan yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 21 orang atau 20%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang sebagian besar tanggapan responden mengatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada dalam kategori *Kurang Baik* yaitu sebanyak 53 orang atau 50,49% responden.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Masyarakat di Kelurahan Batu Panjang yaitu Bapak Rusli mengatakan bahwa :

*“Para pelaksana kebijakan yang berkerja di lapangan kurang mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, mereka tidak memahami setiap pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya sehingga tidak menghasilkan suatu kerja yang baik sesuai yang diinginkan” (hasil wawancara dengan Bapak Rusli pada Hari Jum’at Tanggal 17 Februari tahun 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan, Bapak H.Tarmizi Ahmad beliau mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama dinas terkait seperti Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup seperti pendidikan dan latihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan, yang diadakan setiap tahun demi menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang seluk beluk hutan yang ada dikabupaten bengkalis.” (hasil wawancara dengan Bapak H.Tarmizi Ahmad pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2012 bulan Maret 2012).*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Rupert berada dalam kategori Kurang Baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert. Maka dari itu, pemerintah harus lebih serius dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan tentang perlindungan hutan, baik melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan lain-lain.

## **2.Respon Dari Para Pelaksana Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert**

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Jadi respon yang dimaksud disini adalah tanggapan atau reaksi para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, dalam hal ini tanggapan atau reaksi para pelaksana dilapangan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya di Kecamatan Rupert.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai respon dari para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.14 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Respon Dari Para Pelaksana Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Mangrove**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	4,76
2	Baik	10	9,52
3	Cukup Baik	17	16,19
4	Kurang Baik	54	51,43
5	Tidak Baik	19	18,09
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden menyatakan tentang respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 5 orang atau 4,76% dan yang menyatakan Baik 10 orang atau 9,52%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 17 orang atau 16,19% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 54 orang atau 51,43%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 19 orang atau 18,09%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang sebagian besar tanggapan responden mengatakan tentang respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada dalam kategori *Kurang Baik* yaitu sebanyak 54 orang atau 51,43% responden. Bahkan ada yang menjawab pada kategori Tidak Baik yaitu sebanyak 19 orang atau 18,09%. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut pendapat responden tentang respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert penulis melakukan wawancara dengan responden.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Masyarakat di Kelurahan Batu Panjang yaitu Bapak Agusman mengatakan bahwa :

*“Pemerintah terkesan lambat dalam merespon segala bentuk pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, hal ini dapat terlihat dari pengaduan dan pemberitahuan masyarakat tidak semuanya diterima dan direspon dengan baik. Selain birokrasi yang berbelit-belit membuat masyarakat malas dalam memberikan laporan.” (hasil wawancara dengan Bapak Agusman pada Hari Jum’at Tanggal 17 Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbidang Pengembangan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Nurman beliau mengatakan bahwa :

*“Setiap petugas yang tergabung dalam Satuan Kerja Hutan dan Lahan (SATKER HUTLA) yang diturunkan dilapangan menerima segala pengaduan masyarakat yang kemudian dilaporkan kepada instansi yang membidangi hal tersebut untuk dicarikan solusinya.” (hasil wawancara dengan Bapak Nurman pada Hari Senin Tanggal 12 Maret 2012).*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bahwa respon dari para pelaksana terhadap kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Rupert berada dalam kategori Kurang Baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya respon berupa tanggapan atau reaksi dari para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menangani segala permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan respon yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memberikan laporan dengan baik dan dapat diterima dengan baik pula oleh para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert.

### **3. Memberikan Insentif Bagi Para Pelaksana Kebijakan Perlindungan Hutan Mangrove**

Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada bawahan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian uang diluar gaji sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi pegawai kepada organisasi. Tujuan dari pemberian insentif memberikan rasa tanggung jawab dan dorongan kepada para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Para pegawai akan terpacu untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan insentif dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas pegawai dan mempertahankan pegawai yang berprestasi agar tetap berada dalam organisasi. Insentif adalah dorongan agar seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar dapat mencapai produktivitas yang tinggi sehingga dapat membangkitkan gairah kerja dan motivasi yang tinggi.

Insentif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memberikan insentif bagi para pelaksana kebijakan agar mereka bekerja dengan baik sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang perlindungan hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemberian insentif oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada para pelaksana kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.15 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Insentif Kepada Para Pelaksana Kebijakan Perlindungan Hutan Mangrove**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	9,52
2	Baik	18	17,14
3	Cukup Baik	19	18,09
4	Kurang Baik	43	40,95
5	Tidak Baik	15	14,28
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden menyatakan bahwa pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan perlindungan hutan mangrove Kecamatan Rupert berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 10 orang atau 9,52% dan yang menyatakan Baik 18 orang atau 17,14%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 19 orang atau 18,09% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 43 orang atau 40,95%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan *Tidak Baik* adalah sebanyak 15 orang atau 14,28%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang sebagian besar tanggapan responden mengatakan bahwa pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan perlindungan hutan mangrove Kecamatan Rupert berada dalam kategori *Kurang Baik* yaitu sebanyak 57 orang atau 54,29% responden. Bahkan ada yang menjawab *Tidak Baik* adalah sebanyak 15 orang yaitu 14,28.

Untuk mengetahui lebih lanjut tetang tanggapan responden mengenai pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan perlindungan hutan



mangrove Kecamatan Rupert penulis melakukan wawancara dengan responden. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala UPTD Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Rupert sebagai salah seorang pelaksana kebijakan yaitu Bapak Sisal, SP mengatakan bahwa :

*“Kami sebagai pelaksana kebijakan berkerja sesuai tugas yang dilimpahkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis selalu berusaha berkerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu produk kerja yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak demi tercapainya hutan dari segala bentuk kerusakan, walau sebenarnya dalam pemberian insentif selalu terlambat, bahkan ada yang sampai 3 bulan sekali baru diberikan”. (hasil wawancara dengan Bapak Sisal, SP pada Hari Jum’at Tanggal 17 Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak H. Tarmizi Ahmad beliau mengatakan bahwa :

*“Pemberian insentif diberikan bagi para pelaksana kebijakan dilapangan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan mereka yang diambil dari anggaran yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten bengkalis.” (hasil wawancara dengan Bapak H. Tarmizi Ahmad pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2012).*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Rupert berada dalam kategori *Kurang Baik*. Hal ini disebabkan oleh pemberian intensif yang tidak teratur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan intensif dengan teratur agar para pelaksana kebijakan dapat bekerja dengan baik sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Disposisi para pelaksana terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert secara keseluruhan baik ditinjau dari segi pemahaman dan pengetahuan, respon para pelaksana serta pemberian insentif, penulis sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Disposisi Para Pelaksana Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert**

No	Indikator	Jawaban 105 Responden				
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Pemahaman Dan Pengetahuan Para Pelaksana Kebijakan	0	12	19	53	21
2	Respon Dari Para Pelaksana	5	10	17	54	19
3	Pemberian Insentif Kepada Para Pelaksana Kebijakan	10	18	19	43	15
<b>Skor</b>		<b>15 (5)</b>	<b>40 (4)</b>	<b>55 (3)</b>	<b>150 (2)</b>	<b>55 (1)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>160</b>	<b>165</b>	<b>300</b>	<b>55</b>
<b>Jumlah Skor</b>		<b>755</b>				
<b>Interval Skor</b>		<b>567-819 (Kurang Baik)</b>				

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 3 sub indikator yang diteliti dari indikator Disposisi, tanggapan responden yang menyatakan Sangat Baik berjumlah 75, kemudian yang menyatakan Baik sebanyak 160 dan yang menyatakan Cukup Baik berjumlah adalah 165, adapun yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 300 dan yang menyatakan Tidak Baik berjumlah 55.

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator Disposisi para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert mendapat jumlah skor 755 dan dinyatakan dalam kategori “*Kurang Baik*” (567-819).

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert berada pada kategori Kurang Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kinerja dari pelaksana kebijakan baik itu berupa kemampuan dan keinginan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan agar bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara penulis dengan responden hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi,
2. kurangnya respon berupa tanggapan atau reaksi dari para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menangani segala permasalahan yang terjadi,
3. pemberian intensif yang tidak teratur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

#### **5.2.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu

kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuat kebijakan sampai pada para pelaksana dilapangan.

Adapun sub indikator struktur birokrasi disini meliputi :

### **1. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan**

Pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan di Kecamatan Rupat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.17 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekuensi ( F )</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sangat Baik	5	4,76
2	Baik	24	22,86
3	Cukup Baik	8	7,62
4	Kurang Baik	47	44,76
5	Tidak Baik	21	20
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 5 orang atau 4,76% dan yang menyatakan Baik 24 orang atau 22,86%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 8 orang atau 7,62% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 47 orang atau 44,76%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 21 orang atau 20%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang sebagian besar tanggapan responden mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 47 orang atau 44,76 responden. Dan yang mengatakan Tidak Baik yaitu sebanyak 21 orang atau 20% responden. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan beberapa orang responden dari masyarakat dan pegawai dinas. Hasil wawancara penulis dengan Masyarakat di Desa Pangkalan Nyirih yaitu Bapak Isnanto mengatakan bahwa :

*“Pemerintah Kabupaten kurang mengawasi dengan baik setiap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana kebijakan. Mereka terkesan kurang peduli dengan apa yang dikerjakan oleh para pelaksana kebijakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya setiap pekerjaan yang dibebankan kepada mereka tanpa ada proses pengawasan terhadap bagaimana kerja dan hasil pekerjaan yang mereka lakukan”. (hasil wawancara dengan Bapak Isnanto pada Hari Kamis Tanggal 23Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Drs. Ismail, MP beliau mengatakan bahwa :

*“Setiap pegawai yang telah diberi tugas untuk turun kelapangan mengerti akan tugasnya sebagai orang yang turun langsung kelapangan, jadi setiap pekerjaan yang mereka tidak harus diawasi karena mereka tahu akan tugasnya masing-masing dan akan ditegur bila melakukan kesalahan-kesalahan. Pemerintah juga melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada saat tertentu untuk melihat hasil kerja dan bagaimana kerja yang mereka lakukan. Oleh karena itu bila masyarakat sebagai pihak yang bisa mengawasi dapat langsung melaporkan pegawai yang tidak berkerja dengan baik atau melalaikan perkerjaannya.” (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ismail, MP pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2012).*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Rupert berada dalam kategori Kurang Baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengawasi setiap kerja yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert.

## **2. Memberikan Sanksi Kepada Pelaksana Kebijakan Terhadap Penyimpangan Yang Dilakukan**

Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada yang melanggar peraturan, tata tertib, ketetapan dan keputusan yang diberlakukan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar tersebut.

Sanksi yang dimaksud pada penelitian ini adalah semua tindakan yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan tentang perlindungan hutan baik itu berupa teguran maupun pidana. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan

tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik yaitu melindungi keberadaan hutan mangrove khususnya yang ada di Kecamatan Rupat.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemberian sanksi bagi penyimpangan yang terjadi dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 5.18 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemberian Sanksi Kepada Pelaksana Kebijakan Terhadap Penyimpangan Yang Dilakukan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	4,76
2	Baik	20	19,05
3	Cukup Baik	17	16,19
4	Kurang Baik	50	47,62
5	Tidak Baik	13	12,38
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden mengenai sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 5 orang atau 4,76% dan yang menyatakan Baik 20 orang atau 19,05%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 17 orang atau 16,19% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 50 orang atau 47,62%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 13 orang atau 12,38%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang sebagian besar tanggapan responden mengenai sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi berada dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 50 orang atau 47,62% responden.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat di Kelurahan Terkul yaitu Bapak Iskandar mengatakan bahwa :

*“Masyarakat awam biasanya kurang mengetahui akan bentuk sanksi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan, selain itu dilihat dari kejadian masa lalu pemberian sanksi kepada para kebijakan kurang berjalan dengan baik, para pelaksana kebijakan tidak dihukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada efek jera dalam melakukan pelanggaran,”(hasil wawancara dengan bapak Iskandar pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Drs. Ismail, MP beliau mengatakan bahwa :

*“Kami menerima segala pengaduan dari masyarakat apabila terjadi kesalahan dalam pekerjaan oleh para pelaksana kebijakan di lapangan. Mengenai sanksi yang diberikan kepada petugas lapangan yang melanggar apa yang ditugaskan dan menjadi tanggungjawab mereka telah diatur dalam tata-tertib PNS, yang dimana mereka ditegur lebih dahulu, kemudian baru dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku bisa berupa hukum pidana dan juga diberhentikan dari pekerjaannya sebagai PNS”. (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ismail, MP pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2012).*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi kepada para kebijakan tentang perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupert masih berjalan Kurang Baik. Hal ini disebabkan dalam pemberian sanksi kepada para pelaksana kebijakan kurang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada efek jera dalam melakukan pelanggaran. Sehingga pelanggaran tersebut akan terus terjadi. Selain hanya terjadi bila ada pengaduan dan kesalahan dalam berkerja selain itu masyarakat tidak mengetahui akan sanksi tersebut. Sehingga hal itu bertentangan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert.



### 3. Memiliki Tanggungjawab Untuk Bekerja

Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus di lakukan agar pekerjaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam menjalankan tugas pekerjaan, karena tanpa tanggung jawab maka semuanya akan menjadi kacau. Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupat sangat dibutuhkan tanggungjawab para aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dalam bekerja, karena tanpa adanya tanggungjawab dalam bekerja implementasi kebijakan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai tanggungjawab para pelaksana kebijakan dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 5.19 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tanggungjawab Dalam Bekerja Para Pelaksana Kebijakan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi ( F )	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	2,86
2	Baik	26	24,76
3	Cukup Baik	13	12,38
4	Kurang Baik	50	47,62
5	Tidak Baik	13	12,38
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 105 orang responden yang tanggapan responden mengenai tanggungjawab dalam bekerja para pelaksana kebijakan dalam perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada pada kategori Sangat Baik adalah sebanyak 3 orang atau 2,86% dan yang menyatakan Baik 26 orang atau 24,76%. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan

Cukup Baik berjumlah 13 orang atau 12,38% dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 50 orang atau 47,62%. Adapun tanggapan responden yang menyatakan Tidak Baik adalah sebanyak 13 orang atau 12,38%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang sebagian besar tanggapan responden mengenai tanggungjawab dalam bekerja para pelaksana kebijakan dalam perlindungan hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 50 orang atau 47,62%., dan yang mengatakan Tidak Baik yaitu sebanyak 13 orang atau 12,38%. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Tanjung Kapal yaitu Bapak Sudjapar mengatakan bahwa :

*“Tanggung jawab dari pelaksana kebijakan dalam melakukan tugas dalam perlindungan masih kurang baik. Mereka seakan-akan hanya melihat dan mendengar tanpa ada yang berkerja keras untuk berusaha menanggulangi kerusakan yang terjadi. Hal ini sangat riskan mengingat mereka berkerja memakai uang rakyat. Masih banyak pegawai yang hanya ngobrol, canda tawa di kantornya tanpa ada perkerjaan padahal dilapangan banyak terjadi perusakan terhadap hutan mangrove”. (hasil wawancara dengan Bapak Sudjapar pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2012)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbidang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak Nurman beliau mengatakan bahwa :

*“Kantor BLH bersama Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis sering memberikan seminar-seminar akan pentingnya tanggung jawab dalam berkerja, karena itu setiap pegawai yang yang diturunkan baik itu sebagai badan penyuluh atau yang lainnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab dalam berkerja sehingga bisa memberikan cita yang baik bagi instansinya.” (hasil wawancara dengan Bapak Nurman pada Hari Senin Tanggal 12 Maret 2012).*

Dari hasil dan wawancara dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab dalam bekerja dalam hal pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Rupert masih Kurang Baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab kerja para pelaksana kebijakan yang tidak mau turun kelapangan untuk melihat seberapa besar kerusakan mangrove. Oleh karena itu, para pemerintah harus bisa membuat para pelaksana kebijakan agar bisa bertanggungjawab dalam bekerja agar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupert dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang struktur birokrasi pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert secara keseluruhan baik ditinjau dari segi pengawasan, pemberian sanksi maupun dari segi tanggungjawab dalam bekerja, penulis sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove Di Kecamatan Rupert**

No	Sub Indikator	Jawaban 105 Responden				
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan	5	24	8	47	21
2	Memberikan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi	5	20	17	50	13
3	Memiliki tanggungjawab untuk bekerja	3	26	13	50	13
<b>Skor</b>		<b>13 (5)</b>	<b>70 (4)</b>	<b>38 (3)</b>	<b>147 (2)</b>	<b>87 (1)</b>
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>280</b>	<b>114</b>	<b>294</b>	<b>87</b>
<b>Jumlah Skor</b>		<b>840</b>				
<b>Interval Skor</b>		<b>820-1070 ( Cukup Baik)</b>				

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa 3 sub indikator yang diteliti dari indikator Struktur Birokrasi, tanggapan responden yang menyatakan Sangat Baik berjumlah 65, kemudian yang menyatakan Baik sebanyak 280 dan yang menyatakan Cukup Baik berjumlah adalah 114, adapun yang menyatakan Kurang Baik adalah 294 dan yang menyatakan Tidak Baik berjumlah 87. Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator yang diteliti, maka dapat diketahui bahwa indikator Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat mendapat jumlah skor 840 dan dinyatakan dalam kategori “*Cukup Baik*” (820-1070). Hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi yang belum berjalan dengan baik antara pembuat kebijakan sampai dengan para pelaksana dilapangan dalam melaksanakan suatu kebijakan serta kurang baiknya pengelolaan kegiatan dari para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara penulis dengan responden hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengawasi setiap kerja yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan,
2. pemberian sanksi kepada para pelaksana kebijakan masih kurang baik dan kurang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada efek jera dalam melakukan pelanggaran pemberian sanksi kepada para kebijakan dan hanya terjadi bila ada pengaduan dan kesalahan dalam berkerja sedangkan masyarakat tidak mengetahui akan sanksi tersebut,

3. kurangnya tanggung jawab kerja para pelaksana kebijakan yang tidak mau turun kelapangan untuk melihat seberapa besar kerusakan mangrove yang terjadi.

### **5.3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Responden Mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert**

Untuk melihat hasil keseluruhan tanggapan responden mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert, penulis mengambil setiap hasil jumlah skor rata-rata indikator penelitian yaitu indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian ini.

Adapun untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.21 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Khususnya Hutan Mangrove di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis**

No	Indikator	Jawaban Responden				
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Komunikasi	85	200	87	270	84
2	Sumber Daya	110	232	261	200	48
3	Disposisi	75	160	165	300	55
4	Struktur Birokrasi	65	280	114	294	87
<b>Skor</b>		<b>335</b>	<b>872</b>	<b>627</b>	<b>1064</b>	<b>274</b>
<b>Jumlah Skor : Jumlah Indikator</b>		<b>3172 : 4</b>				
<b>Jumlah Skor Rata-rata</b>		<b>793</b>				
<b>Kategori</b>		<b>756-1091 ( Kurang Baik )</b>				

*Sumber : Data Olahan 2012*

Dari tabel diatas,dapat diketahui bahwa dari 4 indikator yang diteliti, tanggapan responden yang menyatakan Sangat Baik jumlah skornya adalah 335, kemudian yang menyatakan Baik jumlah skornya adalah 872, Adapun tanggapan responden yang menyatakan Cukup Baik jumlah skornya adalah 627 dan yang menyatakan Kurang Baik jumlah skornya adalah 1064. Selain itu, tanggapan responden yang menyatakan Sangat Baik jumlah skornya adalah 793.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat mendapat skor rata-rata 793, dengan demikian dinyatakan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat berada dalam kategori “ *Kurang Baik*” (756-1091). Hasil ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan responden dan dokumentasi penelitian yang menyatakan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat belum terimplementasi dengan baik.

#### **5.4.Kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.**

Dengan melihat kondisi hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupat yang sudah banyak mengalami kerusakan dan pengurangan akibat adanya penebangan dan pengalihfungsian lahan, maka pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah berupaya untuk menyelamatkan hutan mangrove yang ada yaitu dengan

menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. Namun peraturan tersebut tidak terimplementasi secara baik dikarenakan adanya beberapa hambatan.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Rupat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai sehingga implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan tersebut tidak terimplementasi secara baik
2. Para pelaksana kebijakan dilapangan kurang serius dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya sehingga hasil kerja yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kehidupan dan lingkungan.
4. Belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hutan mangrove tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang sifatnya masih sangat umum yaitu mengenai perlindungan hutan secara umum, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengambang yang

berakibat pada kurang terimplementasinya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan tersebut

5. Adanya keadaan dilema yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, disatu sisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ingin mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan efektif sehingga bisa menjaga kelestarian hutan mangrove dan lingkungan tapi disisi lain Pemerintah Kabuapten Bengkalis tidak menutup mata dengan kondisi masyarakat yang banyak menggantungkan hidupnya dengan hutan mangrove tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 105 orang responden mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert dapat dilihat dari empat indikator implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupert mendapat perolehan skor 722 (567-819), dan dinyatakan berada pada kategori *Kurang Baik*. Hasil wawancara penulis dengan responden yang mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pemerintah yang kurang serius dalam memberikan sosialisasi sehingga kerusakan dari ekosistem hutan mangrove tetap terjadi dan berkelanjutan, jaranganya proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove, serta kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi.
2. Sumber Daya yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan

Rupat mendapat perolehan skor 857 (820-1079), dan dinyatakan berada pada kategori *Kurang Baik*. Hasil wawancara penulis dengan responden mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pelaksana kebijakan yang kurang berkualitas dan berkompeten dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kurangnya penyediaan fasilitas-fasilitas yang di perlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, serta anggaran yang belum cukup memadai

3. Disposisi para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat mendapat perolehan skor 755 (567-819), dan dinyatakan berada pada kategori *Kurang Baik*. Hasil wawancara penulis dengan responden mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi, kurangnya respon berupa tanggapan atau reaksi dari para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menangani segala permasalahan yang terjadi, dan pemberian intensif yang tidak teratur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Struktur Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat mendapat perolehan skor 840 (820-1079), dan dinyatakan berada pada kategori *Kurang Baik*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

responden yang mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengawasi setiap kerja yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, pemberian sanksi kepada para pelaksana kebijakan kurang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta kurangnya tanggung jawab kerja para pelaksana kebijakan yang tidak mau turun kelapangan untuk melihat seberapa besar kerusakan mangrove yang terjadi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi 4 indikator penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berada pada kategori *Kurang Baik atau Kurang Terimplementasi Dengan Baik*. Hal tersebut sesuai dengan hasil rekapitulasi jumlah skor rata-rata tanggapan responden yaitu berjumlah 793 (756-1091). Hasil tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara yang penulis terhadap responden yaitu masyarakat dan pegawai dinas.

Adapun yang menjadi hambatan atau kendala Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan tersebut adalah :

1. Kurangnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah sehingga implementasi Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan tidak terimplementasi secara baik.
2. Belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hutan mangrove tersebut

3. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah para pelaksana kebijakan tidak serius dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga arah dari tujuan kebijakan tersebut kurang tercapai dengan baik
4. Kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove di Kabupaten Bengkalis.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kehidupan dan lingkungan.

## **6.2. Saran**

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal melakukan proses Komunikasi, penulis menyarankan kepada pelaksana kebijakan agar lebih serius menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya baik itu dalam melakukan proses sosialisasi dan pemberian informasi tentang pentingnya melestarikan hutan mangrove serta pemberian informasi tentang sanksi-sanksi bagi yang merusak hutan mangrove agar proses komunikasi kebijakan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam hal penyediaan Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis disarankan penulis agar menunjuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan, menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, serta menyediakan anggaran yang memadai bagi para

pelaksana kebijakan karena tanpa dukungan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang memadai apapun jenis kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik

3. Dalam hal Disposisi para pelaksana kebijakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis disarankan penulis agar mengevaluasi dan memperbaiki kinerja para pelaksana kebijakan baik itu dalam hal pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan, respon dari pelaksana kebijakan, serta pemberian intensif bagi para pelaksana kebijakan agar nantinya hasil kerja yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan
4. Dalam hal Struktur Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus lebih serius dalam melakukan proses pengawasan terhadap para pelaksana kebijakan, tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaksana kebijakan serta meningkatkan rasa tanggung jawab para pelaksana kebijakan agar para pelaksana kebijakana dapat berkerja sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan
5. Disarankan supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mencari solusi yang tepat terhadap kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove di Kecamatan Rupat seperti membangun tanggul pembatas yang kuat pada bibir pantai serta melakukan penanaman kembali (reboisasi) agar hutan mangrove terhindar dari segala kerusakan dan tetap terjaga kelestariannya.
6. Untuk masyarakat disarankan supaya lebih memperhatikan kelestarian hutan mangrove yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimihadja, Kusnoko. 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Indra prahasta.
- Irfan, Muhammad. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Irawan, Soehartono. 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kartawinata, K. S. Adisoemarto, S. Soemodihardjo, dan I. G. M. Tantra, 2000, *Status Pengetahuan Hutan Bakau di Indonesia*, Prosiding Seminar Ekosistem Mangrove, Jakarta: LIPI-MAB: 21-39.
- Ndraha, Talidziduhu, 2003. *Kybernologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2008. *Kybernologi Sebuah Metamorphosis*, Tangerang: Sirao redentia Center.
- Nugroho, Riant D, 2001. “*Reinventing Indonesia Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*”. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- , 2005. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- , 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nybakken, J .W. 2000. *Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purnobasuki, Hery, 2005. *Tinjauan Perspektif Hutan Mangrove*, Surabaya: Air Langga University Press.
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan* Jakarta: Yarsif Watampone.
- Herdasuri, Reza. 2010. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru : UIR.

Rosalaini. 2001. *Analisis Perencanaan dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek*, Pekanbaru, Alaf Riau Bekerjasama Dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Soetopo, 2005. *Pelayanan Prima*. Jakarta: LAN RI.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

------. 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wijaya, Riski. 2011. *Implementasi Program Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Rupat Utara*. Pekanbaru: UIR.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Prasindo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah